



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT SEMENTARA
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 27 Agustus 2020
Waktu	: 10.35 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat Acara	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) : Membahas tentang: 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2019; 2. RKA/KL Tahun 2021; 3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI; dan 4. Isu-isu aktual lainnya.
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 48 dari 55 Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 9 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E., (Ketua Komisi IV DPR RI) 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 3. Ir. Mindo Sianipar 4. Ir. Effendi Sianipar 5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 6. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 7. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.

8. Maria Lestari, S.Pd.
9. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

8 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Budhy Setiawan
4. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
5. Ir. Ichsan Firdaus
6. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
7. Ir. Panggah Susanto, M.M.
8. Alien Mus, S.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 7 orang Anggota

1. G. Budiastrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Renny Astuti, S.H., S.P.N.
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

3 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Sulaeman L Hamzah
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. H. Charles Meikyansah

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

6 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan, S.E. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Drs. H. Ibnu Multazam
4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
5. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
6. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
2. Muslim, S.Hl., M.M.

3. Hj. Nur'aeni, S.Sos, M.Si.
4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

5 dari 5 orang Anggota

1. dr. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
3. Dr. H. Andi Akmal Pasludin, S.P., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.
5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. Fachry Pahlevi Konggoasa, S.E.
3. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, S.Sy.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);

9. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
10. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
11. Fatah Setiawan Topobroto, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Persero);
12. Farida Mokodompit, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero); dan
13. Arif Haendra (Direktur Pengembangan PT Garam (Persero).

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Kelautan Perikanan beserta jajarannya,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia,
Yang terhormat Direktur Utama PT Perikanan Nusantara serta Direktur Utama PT Garam yang hal ini diwakili oleh Direktur Pengembangan karena yang bersangkutan masih ada tugas lain, ini ada surat kuasanya.

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengadakan Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I tahun sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi ganti Bamus tanggal 13 Juli 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 24 Agustus 2020, pada hari ini tanggal 27 Agustus Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN tahun anggaran 2019 serta RKA/KL tahun 2021. Usulan program-program ini akan didanai oleh DAK berdasarkan teknis dari Komisi IV DPR RI serta isu-isu lainnya.

Bapak, Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang "Tata Tertib" Rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB)

Rapat Kerja hari ini dimulai pukul 10.35 WIB sampai dengan selesai. Sesuai dengan Pasal 254 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI.
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan.
5. Kesimpulan rapat.
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Terkait pembahasan rancangan untuk Undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Komisi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dan hasil pembahasannya disampaikan kepada Badan Anggaran secara tertulis.

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja hari ini adalah berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran AG/08459/DPRRI/VII/20 tanggal 20 Juli 2020 hal penyampaian rancangan jadwal pembahasan rencana undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 dan rancangan jadwal pembahasan rencana undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah terlihat dari laporan keuangan Kementerian Kelautan Perikanan tahunan per 31 Desember 2019 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebesar Rp792,4 Miliar atau mencapai 96,26% dari estimasi pendapatan sebesar Rp823,3 Miliar sedangkan realisasi Belanja Negara bersihnya sebesar Rp505 triliun atau mencapai 91,73% dari alokasi anggaran setelah direvisi sebesar Rp5,510 triliun.

Adapun terkait asset tercatat sebesar Rp26,36 miliar, kewajiban sebesar Rp342,99 juta dan ekuitas sebesar Rp26,02 miliar. Oleh sebab itu sangat penting KKP menginventarisasi mendata seluruh pelaksana teknis KKP yang tersebar di Indonesia kemudian mengelola semua asset negara tersebut sehingga kedepannya kepemilikan aset lahan dan bangunan menjadi legal,

sesuai perundang-undangan dan tidak terjadi klaim secara sepihak oleh masyarakat maupun pihak lainnya.

Selanjutnya dalam menghadapi tahun 2021 Pemerintah wajib mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang terus tidak menentu. Program dan kegiatan bersifat pemulihan ekonomi atau padat karya sektor Kelautan dan Perikanan akibat pandemi Covid-19 menjadi suatu keniscayaan yang harus dilanjutkan dan disukseskan secara bersama-sama oleh semua pihak; Pemerintah, DPR dan *stakeholder* mengingat pertumbuhan ekonomi perikanan pada triwulan satu periode 2014-2020 tercatat cenderung melambat hanya mencapai 3,52% dari target tahun 2020 mencapai 7,9%.

Untuk itu dalam rangka mendukung ketahanan pangan Komisi IV DPR RI meminta penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan RKA/KL tahun 2021 senilai 6,65 triliun dalam mendorong peningkatan produksi di sektor kelautan yang ramah lingkungan dengan menjaga kualitas mutu, bernilai tambah dan berdaya saing. Selanjutnya Komisi IV DPR RI juga meminta penjelasan dan langkah tindak lanjut hasil kunjungan kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta isu-isu lainnya:

1. Perkembangan volume dan nilai ekspor impor sebelum dan selama pandemi Covid.
2. Evaluasi dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat Kelautan dan Perikanan melalui program dan kegiatan yang bersifat padat karya akibat pandemi Covid-19 seperti gemar makan ikan, bakti nelayan, bakti mutu karantina, pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
3. Peningkatan bantuan Pemerintah seperti program dan kegiatan bioflok, benih ikan, mina padi, Dewi Bahari, ekonomi kreatif, kompak bugar serta permodalan dalam rangka eksistensi di tengah pandemi Covid 19.
4. Kesulitan masyarakat kelompok daerah pemilihan Dapil dalam meminta rekomendasi dari dinas kelautan disebabkan adanya persyaratan juknis bantuan Pemerintah sehingga menghambat proses verifikasi penyalurannya.

Saudara Menteri, hampir semua Anggota Komisi IV DPR RI sangat sulit sekali meminta rekomendasi dari dinas. Jadi saya harapkan jangan kalau memang tidak melanggar Undang-undang peraturan tidak perlulah minta-minta rekomendasi dari dinas. Dulu juga waktu saudara menteri duduk di sini pun berkata seperti itu, jadi ini kita balik tugasnya adalah mempermudah baik itu dibudidaya maupun yang lain-lain karena keluhannya hanya satu Partai aja kalau tidak satu aliran sulit apalagi beda partai kecuali Hasan Aminuddin temannya banyak dia. Saya minta Eselon I dicatat hal yang paling penting.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas, waktu kami persilakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dr. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan para Bapak Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,

Para Pejabat Eselon 1 beserta seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rekan media dan para hadirin sekalian yang saya hormati.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan Rapat Kerja yang membahas empat agenda pokok yaitu:

1. Laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019.
2. RKA/KL KKP tahun 2021
3. Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2021.
4. Isu-isu aktual lainnya.

Sebelum kami melanjutkan, perkenalkan kami untuk memperkenalkan kekuatan baru kami di Eselon I:

1. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing, sudah ada pejabat baru bernama Ibu Hartati.
2. Dirjen Perikanan Tangkap sementara dijabat pelaksana tugas Bapak Muhammad Zaini ini asli Madura Pak. Jadi Pak Ketua Slamet biar itu mengikuti saran Pak Ketua Slamet pak.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri tadi Ibu asalnya darimana bu?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Jawa Tengah.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah bukan orang Sulawesi bu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Untung bukan Palembang ya pak ya?

Baik Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Izinkan pertama-tama kami menyampaikan hasil laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019 laporan keuangan KKP disusun dan disajikan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat meliputi; laporan realisasi anggaran, neraca laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran yaitu realisasi pendapatan negara bersih berupa PNPB senilai Rp792,5 miliar atau 96,26% dari estimasi pendapatan senilai Rp823,3 miliar, realisasi belanja negara bersih senilai Rp5,05 triliun atau mencapai 91,73% dari alokasi anggaran setelah revisi senilai Rp5,51 triliun.
2. Neraca; nilai aset senilai Rp26,37 triliun dan nilai kewajiban senilai Rp342,99 miliar sehingga nilai ekuitas senilai Rp26,03 triliun.
3. Laporan operasional; pendapatan laporan operasional senilai Rp759,03 miliar sedangkan beban senilai Rp5,86 triliun. Dengan demikian terdapat defisit senilai Rp5,38 Triliun yang dari kegiatan operasional senilai Rp5,1 triliun, kegiatan non operasional senilai Rp282,39 miliar.
4. Laporan perubahan ekuitas awal pada 1 Januari 2019 senilai Rp10,59 Triliun dikurangi defisit laporan operasional senilai Rp5,38 triliun kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp16,44 triliun dan transaksi antar entitas senilai Rp4,38 triliun sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp26,027 triliun.
5. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan RRA/Neraca LO dan LP. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran untuk periode yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan neraca atau laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas sampai dengan 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis aktual. Atas laporan keuangan KKP tahun 2019 tersebut BPK Republik Indonesia menyampaikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP berdasarkan LHP BPK Nomor 13a/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 dalam hal ini KKP akan terus memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan melakukan penyempurnaan beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut dan penguatan.

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Terkait rencana kerja dan anggaran KKP tahun 2021, kami laporkan bahwa pagu anggaran KKP adalah menjadi sebesar Rp6,65 triliun terdiri dari satu pagu indikatif sebesar Rp5,67 triliun dan tambahan pagu anggaran sebesar Rp974,32 miliar. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas Nomor S692 dan B-636 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Rencana pagu anggaran setiap unit kerja Eselon I KKP adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp497,64 miliar;
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp93,76 miliar;
3. Dirjen Perikanan Tangkap sebesar Rp763,57 miliar;
4. Dirjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1,21 triliun;
5. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp978,05 miliar;
6. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp431,7 miliar;
7. Dirjen Pengelolaan Ruang laut sebesar Rp455,35 miliar;
8. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.626.573.626.000,00;
9. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan sebesar Rp 592.719.656.000,00.

Untuk rancangan pagu anggaran KKP berdasarkan program adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp3,51 triliun;
2. Program pengelolaan perikanan dan kelautan Rp2,26 triliun;
3. Program kualitas lingkungan hidup Rp85,38 miliar;
4. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi Rp113,58 Miliar;
5. Program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp310,7 miliar;
6. Program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp289,94 miliar.

Sedangkan berdasarkan sumber dana rencana rancangan pagu anggaran KKP adalah sebagai berikut:

1. Rupiah murni sebesar Rp6,49 triliun;
2. Badan Layanan Umum sebesar Rp32 miliar;
3. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp109,59 miliar;
4. Pinjaman luar negeri sebesar Rp12,32 miliar.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Penggunaan pagu anggaran tambahan 2021 sebesar Rp974,32 miliar direncanakan akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas:

1. Dirjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp304,2 miliar;
2. Dirjen Perikanan Tangkap sebesar Rp134,8 miliar;
3. Dirjen Penguatan Daya Saing sebesar Rp145 miliar;
4. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu sebesar 15,96 miliar;

5. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp89,3 miliar;
6. Badan Riset dan SDM sebesar Rp35,4 miliar;
7. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp148,25 miliar;
8. Untuk dukungan manajemen pada 9 unit kerja Eselon I sebesar Rp102,4 miliar;

dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana dalam slide bahan.

KETUA RAPAT:

Saudara Menteri, nanti saya ingatkan. Ini kan PSDKP, apa pengawasan fungsinya penting sekali?apalagi kan banyak terjadi pencurian-pencurian ikan kemudian insentif bagi anak-anak yang patroli di kapal, itu kalau bisa tolong ditingkatkan termasuk jam patrolinya diperbanyak. Ini kan kemarin terakhir saya ke Batam, saya melihat langsung. Iya agak prihatin juga pas penjatuhan PK tolong dipikirkan itu, usulan kami dari Komisi IV DPR RI.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Pak Ketua tentang pagu anggaran harian mereka yang dari 32, kami sudah mendapat Surat Edaran Menteri Keuangan meningkat menjadi 50.000 Pak Ketua per/orang Per/hari. Tadinya kita mau mengusulkan lebih itu, tapi sementara kemampuan negara baru segitu, kita ini sudah membuat mereka senang. Yang kedua tentang jam kapal dan potensi untuk pengawasan dengan secara satelit maupun *drone* ini sedang kami cari tepat yang sumber-sumber, yang benar-benar bagus sehingga begitu ini sudah dapat, ini segera kita bisa laksanakan Pak Ketua. Jadi fokus kami terhadap pengawasan laut menjadi adalah prioritas utama kami Pak Ketua, terima kasih atas dukungannya Pak Ketua.

Dengan demikian dalam RKA/KL KKP tahun 2021 kegiatan prioritas perikanan tangkap antara lain; pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, bantuan premi asuransi nelayan, fasilitas sertifikat hak atas tanah nelayan, rehabilitasi pelabuhan perikanan, kampung nelayan maju, visibilitis studi pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dan bertaraf Internasional, pelayanan perizinan SILAT dan simkada dan operasional SKPT di empat lokasi. Kegiatan prioritas Perikanan Budidaya antara lain: kegiatan percontohan cluster kawasan tambak udang dan *millenial shrimp farming*, minapadi, bioflok, ekskavator, pengelolaan irigasi, tambak atau kolam, kebun bibit, rumput laut, mesin pakan dan bahan baku pakan mandiri, kaji budidaya

laut, percontohan pakan alami dan budidaya ikan hias, bantuan benih ikan dan calon induk, bantuan bibit rumput laut, pembangunan rehabilitasi sarpras UP HSRT, model usaha ikan konsumsi, kepiting SIDAT budidaya laut, pra sehat kan, asuransi usaha budidaya dan operasional SKPT di tiga lokasi.

Kemudian kegiatan prioritas penguatan daya saing antara lain: Pembangunan Gudang Beku, *Integrated Cold Storage*, Pasar Ikan, Sentra Kuliner, Pasar Ikan Modern, *Iceflake Machine*, *Chest Freezer* Dan Peralatan Pengolahan, Mobil Berefrigeracy, Perlengkapan Pedagang Ikan, Gemar Ikan, Sarana Pemasaran Dan Pascapanen, *visibility* Studi Pasar Ikan bertaraf internasional serta operasional SKPT di dua lokasi. Kegiatan prioritas pengelolaan ruang laut antara lain penanaman mangrove, penyusunan rencana zonasi, pengelolaan kawasan konservasi, pembangunan dermaga apung, tempat pengolahan sampah, pusat daur ulang di PPK, pembangunan pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, pengembangan kawasan pesisir tangguh, integrasi pergaraman, sarana niaga garam rakyat, percontohan washing plant garam, sarpras wisata bahari, perbaikan gudang garam rakyat dengan standar SNI type c, sentra ekonomi garam rakyat, bantuan kelompok penggerak konservasi atau KOMPAK dan operasional SKPT di empat lokasi.

Kegiatan Prioritas Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan antara lain: Operasional Kapal Pengawas Dan Pesawat Patroli, Bangunan Pos Pengawas Pengawasan Kawasan Konservasi, Pengawasan Kepatuhan Kapal Perikanan Dan Pembudidayaan Ikan, *Water Cannon* Kapal Pengawas, Pembangunan Kapal Pengawas, Bangunan Pos Pengawas Dan Pembinaan Pokmaswas. Kegiatan prioritas riset dan sumber daya Kelautan dan Perikanan antara lain: Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Pelatihan Dan Penyuluhan, Sertifikasi Kompetensi, Pengabdian Pendidikan Tinggi KP, Mobile Simulator, Model Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, Sarpras Reset Data Satelit Radar, Stok Assesment Dan Sarpras Riset, Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan KB.

Kegiatan prioritas Karantina Ikan Dan Pengendalian Mutu antara lain: Pelayanan Sertifikasi Dan Pengawasan Karantina, Sertifikasi Dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan, Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berstandar Internasional, Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Karantina Dan Mutu Hasil Perikanan Serta Pengawasan Di Perbatasan.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Kami melaporkan pula KKP mengusulkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp3,28 triliun untuk mendukung prioritas nasional dan *Major Project* dalam RPJMN tahun 2020-2024. Arahan Presiden pada Ratas tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Bidang Kemaritiman Dan Investasi untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional antara lain untuk kegiatan:

1. Sentra industri Kelautan dan Perikanan terpadu Natuna Utara mendukung pengelolaan perikanan berbasis BPN RI di WPN RI 711.
2. Sentra industri perikanan terpadu Maluku mendukung lumbung ikan nasional dan pengelolaan perikanan berbasis WPPN RI di WPPN RI 715.
3. Perluasan program gerakan memasyarakat makan ikan, Gemar Ikan.
4. Pembangunan sistem rantai dingin dalam rangka mendukung sistem logistik ikan nasional.
5. Pembangunan sentra kuliner.
6. Pembangunan pusat *fruit stock* induk dan pemberian budidaya air tawar.
7. Rehabilitasi ekosistem melalui penanaman mangrove dan terumbu karang.
8. Penyusunan rencana zonasi kawasan antar wilayah, kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional pulau-pulau kecil terluar untuk mendukung perizinan investasi.
9. Pendataan lahan perikanan budidaya.
10. Pembangunan *War Room* KKP dan Media center KKP.

Untuk itu kami mohon dukungan Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI terhadap usulan penambahan pagu alokasi anggaran KKP tahun 2021 tersebut.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan dikelompokkan menjadi dua yaitu di DAK KP untuk provinsi dan DAK KP untuk kabupaten kota. Ada 8 kriteria teknis, penilaian teknis DAK di bidang Kelautan dan Perikanan bagi provinsi dan 4 kriteria teknis bagi kabupaten kota. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor S229/PK/2020 tanggal 4 Juni 2020 dari total alokasi pagu DAK tahun 2021 sebesar Rp65,25 triliun; DAK bidang KP mendapatkan alokasi sebesar Rp1 triliun terdiri dari DAK KP provinsi sebesar Rp350 miliar dan DAK kabupaten kota sebesar Rp650 miliar. Secara garis besar terdapat 7 menu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh provinsi dan 4 menu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh kabupaten kota.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Terkait isu-isu aktual, pertama kami laporkan bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-180/MK:/2020 tanggal 8 Agustus 2020 KKP mendapatkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp474,9 miliar sehingga total pagu akhir APBN-perubahan KKP tahun 2020 menjadi Rp5,075 triliun, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap sebesar Rp89,5 miliar

2. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya sebesar Rp297,5 miliar.
3. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp36,07 miliar.
4. Program Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp48,1 miliar.
5. Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur sebesar Rp4,08 miliar.

Dengan rincian kegiatan sebagaimana pada bahan paparan yang telah kami sampaikan, kami berharap dengan tambahan anggaran pada tahun 2020 ini dapat memberikan dampak pada percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Pada kesempatan ini kami melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak KKP terus mengalami trend peningkatan. Kami laporkan 25 Agustus 2020 PNPB KKP mencapai Rp533,64 miliar dengan rincian:

1. PNPB SDA sebesar Rp394,18 miliar.
2. Non SD sebesar Rp106,49 miliar.
3. BLU sebesar Rp32,97 miliar.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan promosi produk UMKM sektor Kelautan dan Perikanan melalui ekosistem digital, KKP mendukung pelaksanaan gerakan nasional bangga buatan Indonesia melalui “Gebyar Pasar Laut Indonesia” yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Hingga saat ini tercatat sudah 601 UKM dengan 856 produk terdaftar sebagai platform digital. Kami mohon dukungan Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dapat membantu pergerakan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sebagaimana disampaikan Pimpinan pada pengantar sidang tadi, kami melaporkan bahwa nilai ekspor hasil Kelautan dan Perikanan pada semester 1 tahun 2020 naik 6,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Selain itu nilai ekspor bulan Juni 2020 naik 38,0% dibandingkan bulan Mei 2020 dan naik 6,2% apabila dibandingkan bulan Juni 2019, sedangkan nilai impor turun 5,9% dibanding Semester 1 tahun 2019. Dengan demikian neraca perdagangan Semester 1 tahun 2020 mengalami surplus 2,2 miliar dolar atau naik 80,3% dibanding Semester 1 tahun 2019.

Selain itu kami melaporkan bahwa sejak periode Oktober 2019 sampai 18 Agustus 2020 KKP telah menangkap 71 kapal ikan ilegal yaitu 54 kapal berbendera asing dan 17 kapal berbendera Indonesia. Hingga saat ini sudah ada 66 kasus yang menjalani proses hukum dan 17 diantaranya sudah dinyatakan ingkrah. Dari 367 ABK asing yang ditangkap, 44 diantaranya sudah dipulangkan ke negara asal sementara sisanya masih menjalani proses hukum, pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras para pengawas dan petugas di tengah laut di saat kita membatasi aktivitas selama pandemi. Mereka terus berjuang dalam menegakkan kedaulatan dan melindungi sumber daya laut kita.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja kali ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Bapak Ibu seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seluruh saran, masukan dan rekomendasi Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2021. Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om santi santi santi om.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada saudara menteri yang sudah menyampaikan, cuman ini ada beberapa hal yang harus kita bahas dan kita harus konsekuen, contohnya desa wisata ini yang dibawa Pak Haryo ini 100 desa wisata hilang. Sedangkan waktu usulan pertama itu yang tahun 2021 ada 100 tapi ini hilang, tolong ini diperhatikan karena desa wisata ini bisa dibawa sebagai usulan Dapil. Usulan Dapil para Anggota Komisi IV, yang kedua desa wisata juga hilang saya minta tolong kita harus konsekuen awalnya ada, begitu ada penambahan anggaran itu ada usulannya tetapi dalam bahan yang disajikan hari ini, hilang. Jadi nanti kita bahas pada itu, saya tidak mau ada yang dihilangkan karena waktu usulan tambahan itu sudah dicantumkan.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan, selanjutnya kami persilahkan kepada Anggota Komisi IV untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya hari ini kita fokus pada laporan keuangan dan rencana kerja tahun 2021.

Silakan.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Silakan Ibu Endang, proposal nggak bawa? nggak ya.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri yang saya banggakan dan saya hormati dan juga jajarannya dan para anggota dewan yang terhormat, khususnya pak ketua kita yang saya banggakan.

Pertama kali saya *appreciated* pak, bapak telah mengangkat seorang putri perempuan Bu Teti kebetulan Angkatan 17 pak dari ITB, jadi saya bisa berkoordinasi karena saya Angkatan 5. Yang kedua hasil kunjungan kami pak ke Pelabuhan Perikanan di Kejawan, saya sangat terharu pak karena dibuat sebagai Pelabuhan Perikanan Dan saya dilahirkan di situ pak di Kejawan tapi ternyata mohon maaf pak belum ditata dengan baik. Jadi yang dulunya Hutan Mangrove itu hilang pak kemudian ada usul padahal dijadikan pelabuhan wisata, nah ini mudah-mudahan bisa di disosialisasikan secara *bottom up* karena Masyarakat Cirebon khususnya itu kurang perhatian pada kebersihan dan juga itu pak untuk parkir-parkir kapal itu tidak teratur pak, jadi kelihatannya berantakan.

Nah yang ketiga ada penelitian dari UGM, jadi saya sangat *appreciated* ke bapak yang sudah mulai menghargai para peneliti kita. Nah jadi di UGM ini ada penelitian HPI pak, Hidrolisa Protein Ikan. Nah kalau bisa dikembangkan di pusat-pusat perikanan dengan metode yang sederhana akan bagus sekali bisa meningkatkan daya saing dan juga nilai tambah kesejahteraan para nelayan khususnya untuk ibu ibunya Pak. Nah yang keempat pak, saya juga sangat bangga bahwa di Kementerian Perikanan BLU-nya bagus sekali, nah ini embrio dari bantuan Bank Credit Agricole kebetulan dulu saya Direktur Pembiayaan yang mengkoordinir Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sayangnya di pertanian dijadikan BLT pak jadi hancur. Nah jadi saya ingin melaporkan ke *Bank Credit Agricole* tentang BLU perikanan pak supaya disupport lagi dananya dari *Bank Credit Agricole* Prancis Kebetulan saya yang meng-*arrange*, terima kasih atas perhatiannya.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum wabarakatuh wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan pemimpin dari Yohanis Fransiskus Lema dari Nusa Tenggara Timur.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan yang saya hormati,

Pak Menteri, Pak Sekjen, jajaran Eselon I dan pejabat terkait yang hadir pada pagi hari ini.

Pada kesempatan pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pencapaian opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saya kira ini satu prestasi yang patut diapresiasi, yang kedua Pak Menteri saya mewakili masyarakat NTT juga ingin menyampaikan terima kasih kemarin ada program Gemar Ikan dan pelatihan diversifikasi olahan ikan, ibu-ibu di dua Kabupaten ; Sumba Timur dan di Belu itu senang sekali, mungkin selanjutnya perlu ada lagi. Kalau kemarin produk ikan, mungkin ke depan produk rumput laut dan sebagainya. Terima kasih Prof kemarin kita sudah kerjasama dengan baik. Yang berikut soal data KKP 6 Juli 2020 pak soal penyerapan anggaran, ini KKP ada di angka 38,19% dari pagu anggaran sebesar 4,6 triliun artinya sekitar masih 60% anggaran KKP itu belum sampai ke rakyat pak, bacaan sederhananya berarti rakyat belum merasakan program KKP, belum mendapatkan apa-apa pak padahal nelayan Ini membutuhkan baik nelayan tangkap, budi daya dan juga bagaimana menggerakkan Inovasi dan kreasi untuk produk-produk olahan ini pak.

Kemarin saya reses di lima kabupaten pak; Kabupaten Belu, TTS, TTU, Rote ndao dan Sabu Raijua mereka mengeluhkan banyak hal pak terutama nelayan tangkap menyangkut sarana dan prasarana pak di Pantura Timor itu wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste pak, buini atapupu dan lain-lain. Itu potensi perikanan tangkapnya sangat luar biasa pak tetapi ironisnya di sana juga menjadi kantong kemiskinan padahal Pantura Timor ini merupakan beranda depan Republik Pak dan pada saat kemarin tanggal 14 Pak Jokowi pidato di hadapan MPR, 17 pada saat menaikkan bendera merah putih sekian secara simbolik Pak Jokowi pakai baju tenun dari dari NTT dari TTS dan Sabu itu sebenarnya memberi pesan pada para menteri tolong perhatikan NTT lebih banyak. Saya kira seperti itu pak ya karena Pak Jokowi orang Jawa mungkin bahasa simboliknya seperti itu pak.

Yang berikut soal postur anggaran, yang saya lihat untuk 2021 pak, secara konseptual sering dikatakan laut masa depan Indonesia tetapi secara faktual saya melihat laut ini belum menjadi ruang dan sumber hidup pak. Luas laut kita 5,8 juta, 71% adalah laut ,panjang garis pantai 95.000 sekian, nomor dua di dunia tetapi orientasi kita masih di darat pak. Nah karena itu saya mendukung KKP Komisi IV kita harus mendorong untuk meningkatkan anggaran KKP ini. Mohon maaf saya perlu memberikan perbandingan sedikit, kemarin kita senang lah Kementerian Pertanian itu ada di angka Rp21 triliun, nah kenapa Kementerian Kelautan dan Perikanan cuma Rp6,6 triliun. Kalau kita periksa lagi Ditjen Perikanan Tangkap itu hanya sekitar Rp763 miliar, budidaya Rp1,2 triliun, kita ini serius bernegara atau tidak? serius mau membangun sektor maritim kita atau tidak? masa depan kita menurut saya ada di laut. Itulah mengapa sejak saya jadi Anggota DPR RI pak, NTT Itu bukan lagi nasib tidak tentu, nanti Tuhan tolong tapi NTT itu sudah menjadi nelayan tani ternak. Masa depan NTT ada disitu pak dan saya kira ini juga masa depan Republik Indonesia.

Yang berikut pak, saya juga mau menyoroti secara khusus soal Pendapatan Negara Bukan Pajak terutama terkait dengan ekspor benih lobster nih pak. Nah sampai kini sepengetahuan saya, Kementerian keuangan itu belum menerbitkan mekanisme pungutan terkait pendapatan negara bukan pajak. Namun kita tahu 12 Juni 2020 Kementerian KKP sudah mengekspor benih lobster ke Vietnam, padahal peraturan turunannya setahu kami belum ada pak dan PNPB yang diperoleh itu per 60.000 benih lobster harganya hanya 15.000 pak. Menurut saya ini sangat rendah, lalu pertanyaan yang paling mendasar untuk apa kebijakan ini? dan apa manfaatnya buat peta nelayan kita? masyarakat miskin di Indonesia 25% itu adalah nelayan pak. Kalau 60.000 benih lobster diekspor ke luar negeri dan PNPB-nya buat negara ini cuma Rp15.000 ini kebijakannya jelas tidak pro kepada nelayan. Mohon maaf saya harus mengatakan ini pak, di sisi lain eksportir benih lobster ini untung gila-gilaan pak padahal dalam beberapa kesempatan sebelumnya kita diskusi semangat Permen ini, bicara ekspor benih lobster ini semangatnya budidaya lobster. 2% pembudidayaan dilepas itu menurut saya masih sangat rendah pak.

Terakhir saya ingin menegaskan, saya berdiri pada posisi untuk mendukung KKP dalam bentuk peningkatan postur anggaran ini tetapi tolong kebijakan menyangkut ekspor benih lobster ini, kita pikirkan kembali kalau manfaatnya cuma 15.000 buat nelayan ini. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Kyai Hasan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih Pak Yohanis Fransiskus Lema yang semangatnya untuk mensejahterakan rakyat NTT ya? nanti kalau sudah bosan DPR jadi gubernur. Pak Johan Rosihan silakan, Pak Ustadz.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ketua Kyai Hasan, Mas Budi yang saya hormati beserta seluruh Anggota Komisi IV DPR RI,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini.

Saya Pak Ketua, saya sengaja mengambil posisi setelah Kakak Fransiskus Lema iya? satu laut soalnya, satu laut; laut Flores kita, iya? nah saya mulai bahwa mendengar pidato Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia pada pengantar nota keuangan tanggal 14 Agustus, beliau sudah mencanangkan bahwa nilai tukar nelayan pada APBN 2021 adalah 104, Februari NTN kita itu turun 0.65, 0.79% dibanding dengan Januari artinya posisi per Februari Nilai Tukar Nelayan kita ada pada angka 100,6. Kita butuh 4 poin untuk merealisasikan apa yang menjadi pidato Presiden Jokowi pada tanggal 14. Karenanya mohon Pak Menteri jelaskan kepada kami apa kira-kira langkah-langkah menuju pada nilai tukar nelayan 104 itu? karena kalau sudah bicara tentang nilai tukar nelayan, maka semua program 2020 kebawah tidak boleh lagi di *copy paste* pada tahun 2021 karena sampai 2020 orientasi kita masih

produksi Pak Menteri, tetapi kalau sudah bicara tentang nilai tukar nelayan maka kita bicara orientasinya adalah seberapa besar kita bisa mensejahterakan petani dengan anggaran 6,6 itu. Nilai tukar nelayan, karenanya Pak Menteri, Pak Ketua yang saya hormati, saya berdiri sejajar dengan Kakak Fransiskus Lema bahwa saya mendukung untuk kita menambah anggaran porsi ini karena jangan sampai kita mengeluarkan *hastag*, mengeluarkan *take line* segala macam itu, di laut kita. Kita apa jaya ya? terus apa Indonesia negara dengan luas pantai terpanjang segala macam tapi anggaran perikanan kelautan kita hanya cukup 6.6 jauh dibanding dengan maka darat seperti sudah diulas sama itu.

Nah kenapa saya sampaikan ini di depan Pak Ketua? karena saya ragu dengan apa yang dipaparkan oleh Kementerian Kelautan ini pada slide nomor 6, kita bisa melihat sama-sama bahwa dukungan manajemen itu, anggaran untuk dukungan manajemen itu lebih dari 50% dan yang paling rendah adalah nilai tambah dan daya saing industri perikanan. Dukungan manajemen itu 3,5 triliun sementara untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing industri itu hanya 289 miliar.

Nah ini berarti bahwa Kementerian Kelautan Perikanan belum serius untuk melakukan industrialisasi di sektor perikanan yang menempatkan program nilai tambah dan daya saing industri pada paling buncit itu menunjukkan bahwa KKP ini belum serius dalam sektor, padahal berdasarkan survei Bappenas potensi untuk pada sektor peningkatan nilai tambah dan industri di sektor perikanan ini mencapai 108 triliun pertahun. Karenanya saran saya Pak Ketua ke Pak Menteri adalah bagaimana kita melakukan relokasi agar pada program nilai tambah dan perikanan dan daya saing industri di sektor perikanan ini bisa ditambah anggarannya dengan melakukan penghematan dibidang dukungan manajemen dan sektor-sektor yang mungkin tidak berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat.

Yang berikutnya pada saat slide nomor 7 ya, kita melihat bahwa saya membandingkan antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan BRSDM. Iya saya tahu ada gaji di sini, Dirjen Tangkap itu hanya Rp763 miliar sedangkan untuk dukungan manajemen pada SDM itu ada Rp1,6 triliun. Kondisi nelayan kita tadi sudah digambarkan karena kami satu garis pantai, masyarakat kita pak masih butuh alat tangkap, masih butuh keramba jaring apung bukan hanya untuk budidaya, untuk tangkap pun. Iya itu karenanya saya mengusulkan kepada Pak Ketua, mari kita mengajak menteri ini untuk berbicara, menghitung PNPB khusus lobster karena saya di garis pantai di Samudera Indonesia bagian selatan itu salah satu sentra lobster pak, butuh dukungan alat tangkap, butuh yang seperti perahu, kerapa jaringan apung segala macam itu. Nah tentu juga kita harus berdampak kepada pendapatan daerah.

Nah yang berikutnya Pak Ketua di slide Nomor 9 saya melihat ada pengurangan volume satuan dari gemar ikan. Iya Ini cuma 50 lokasi Pak Ketua, Anggota Komisi aja 54. Nah dalam 54 itu di 1 lokasi, di 1 Dapil itu ada 3 anggotanya ada yang 2, nah karenanya ini perlu diperbanyak untuk meningkatkan gizi, meningkatkan imun masyarakat di saat pandemi ini. Gemar

ikan ini ditambah Pak Menteri, insya Allah teman-teman di Banggar ini mudah-mudahan usulan Pak Menteri bukan hanya 3,3 saya mengusulkan tambah 5 triliun untuk kementerian ini agar gemar ikan, agar peningkatan industri nilai tambah itu bisa kita cover. Disamping itu juga saya mengusulkan karena saya belum lihat disini. Saya ingin membuat sebuah contoh atau pilot project Pak Menteri dengan judul penguatan ekonomi melalui pengembangan kawasan minapolitan yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah khusus pulau-pulau kecil ini saya tidak banyak mendengar Pak Menteri untuk mengelaborasi ini padahal pulau-pulau kecil ini terutama di bagian timur itu Maluku Utara, Maluku, NTT, NTB ini ada berapa daerah-daerah kepulauan yang banyak sekali dan kita punya dasar hukumnya punya Undang-undangnya tetapi dalam konteks anggarannya belum banyak diperhatikan.

Berikutnya saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tentang memberikan prioritas pembangunan sistem rantai dingin dalam rangka mendukung sistem logistik ikan terutama pada daerah-daerah yang potensial, salah satu contohnya adalah kawasan Teluk Saleh di Pulau Sumbawa. Terakhir untuk dana alokasi khusus, fisik saya menyarankan kepada Pak Menteri agar fokus kepada peningkatan kualitas garam rakyat. Pak Menteri ketika saya reses kemarin, saya di Kabupaten Bima tepatnya di Desa San Holo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, itu mereka mengeluhkan bahwa sudah 3 tahun terakhir tidak ada lagi perusahaan atau tidak ada pihak yang bertanya tentang harga garam ini. Jadi harga garam mereka itu seperti dibuat langsung dibuang, tidak diserap oleh industri. 3 tahun yang dulu masih banyak industri-industri yang bertanya tentang harga, sekarang jangankan membeli bertanya saja tidak. Karenanya saya berharap agar mendapatkan perhatian, memberikan dukungan kepada petambak-petambak garam tradisional kita, agar bisa diserap oleh industri. Mungkin itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Suhardi Duka.

Pak Menteri perlu digarisbawahi tadi dari Pak Johan, coba program-program kerakyatan itu jangan dikurangi. Saya malah tiga kali lipat kan dari rencana yang ditulis dalam *draft* itu. 5 kali lipat saya sepakat contohnya Gemar Makan Ikan, duitnya ya nanti kita upayakan pak dan mengalihkanlah dari program-program yang kurang strategis termasuk yang disini Bakti Mutu Karantina, itu tanggapan masyarakat luar biasa, hindari memberi dari pabrikan langsung pada petani. Kami persilakan Pak Suhardi.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.)

Sebentar Pimpinan.

Itu nilai satu paket berapa gemar makan ikan?

Yang lalu 170 juta ya? yang lalu? kalau nggak salah yang lalu itu 170 juta kalau nggak salah. 200 juta ya tetep aja 200 juta biar tambah banyak volumenya, tidak perlu dirubah jadi 300 juta. Iya nanti tinggal kita sisir, kita tambahkan lagi supaya Anggota Dewan kalau pulang ke kampungnya melihat masyarakat masih banyak yang belum bisa makan ikan kan bisa makan ikan. Jadi jangan ada slogan makan ikan sehat tapi ikannya nggak ada, iya. Iya silakan Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Selamat siang.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu.

Saya hormati Pimpinan,
Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Pak Menteri bersama dengan seluruh jajaran pejabat Eselon I.

Saya kira kondisi ekonomi saat ini kita tahu persis bahwa kita menuju resesi, kita sudah minus 5,32% dan KKP *Alhamdulillah* masih tumbuh 2,19%. Tentunya kita perlu disyukuri namun kalau kita lihat potensi KKP masih bisa tumbuh diatas daripada 2,19. Untuk itu kita juga apresiasi karena KKP 2019 sudah WTP dari sekian lama *disclaimer*. Kita melihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP Realisasi Pendapatan 96,26%, belanja 91% dan nilai ekuitas saat ini 2,6 triliun lebih. Saya kira ini cukup kaya KKP, pertanyaannya adalah apakah manfaat dari belanja 5 triliun 2019? sudah WTP tidak perlu lagi kita pertanyakan auditnya karena sudah WTP saatnya adalah manfaat. Tentu kita hitung dari pertumbuhan ekonomi yang disumbang oleh KKP 2019, berapa kontribusi KKP di dalam pertumbuhan ekonomi 2019? yang kedua NTP nelayan apa naik atau tidak? kita belanjakan 5 triliun kalau nelayan NTP-nya justru turun saya kira manfaat belanja ini walaupun WTP tidak mendapatkan manfaat dari si nelayan.

Yang ketiga adalah berapa daya serap tenaga kerja yang dibelanjakan 5 triliun lebih? Pendapatan Negara tadi yang masuk di sini yang sudah pelaporannya adalah BNP 756 miliar lebih, saya kira kalau kita support hanya belum pajak ekspor nya perikanan belum ada laporannya. Saya kira semua ini perlu dijawab untuk menilai LKPP Kementerian KKP, nantinya akan menjadi rekomendasi Komisi IV untuk mendapatkan persetujuan LKPP APBN 2019.

Kemudian saya masuk tahun anggaran 2020 sampai saat ini daerah belum merasakan hadirnya KKP di daerah dan dapil dan hanya satu kegiatan yaitu gemar makan ikan Pak Menteri. Kita rasakan gemar makan ikan, tapi nelayan belum merasakan secara menyeluruh apa pengadaan kapal tidak ada? bantuan-bantuan yang menjadi aspirasi belum turun, iya jadi saya melihat walaupun 2020 ini kan masih berjalan ya semoga saja bisa terealisasi dan

dirasakan oleh masyarakat kita 2020 ini. Kemudian 2021 pagu anggaran Rp6,6 triliun, saya kira rakyat ingin merasakan anggaran ini sebagai sporting dalam peningkatan kesejahteraan mereka. Dalam pengajuan yang disampaikan tidak jelas persentasenya berapa untuk belanja publik? dan berapa untuk dukungan manajemen dan belanja pegawai? kita ingin ya 60% lah belanja ke publik, jangan justru belanja pegawai dan dukungan manajemen lebih 50% artinya kalau belanja itu lebih 40% berarti dana 6,6 triliun itu hanya berputar-putar di Kementerian. Ada 2 dirjen yang terkait langsung walaupun secara menyeluruh terkait tapi memiliki peranan yang besar :

1. Dirjen Perikanan Tangkap, ini butuh kapal, butuh rumpon, butuh macam-macam. Saya lihat anggarannya justru kecil hanya Rp763 miliar.
2. Dirjen Perikanan Budidaya butuh bibit, butuh ekskavator butuh macam-macam saya kira sudah mencerminkan Rp1,2 triliun.

Saya mohon kepada menteri dan jajaran bisa menyesuaikan anggaran yang diajukan ini pagunya sesuai dengan tingkat kebutuhan petani tentunya. Sekarang kita sudah ekspor baby lobster tapi program 2021 saya tidak melihat ada upaya budidaya-budidaya baby lobster, pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh ingin menghabiskan sumber daya alam kita demi untuk kepentingan nggak jelas? olehnya itu saya minta supaya program budidaya baby lobster ini menjadi bagian dari pada program untuk mendukung ekspor, jadi tidak hanya mengandalkan dari sisi alam. Demikian anggaran kita tidak terlalu tertuduh bahwa menghabiskan sumber daya alam kita demi untuk kepentingan tertentu.

Saya kira ini yang saya sampaikan kepada Pak Menteri, terima kasih dan saya support yang telah dilakukan oleh Pak Menteri dan sudah bisa WTP dan saya kira ini adalah langkah yang baik untuk tahun 2020. Kita juga harap bisa WTP. Demikian terima kasih.

*Wallahul muwafiq Ila aqwamith thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Ibu Ema.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan beserta Bapak Ibu Anggota Komisi IV DPR RI mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, amin, Bapak Menteri beserta jajaran yang kami hormati.

Yang pertama yang ingin kami sampaikan mengenai rancangan pagu anggaran KKP tahun 2021, jika kami mencermati sebagian besar alokasi

anggarannya untuk pembangunan fisik seperti rehabilitasi sarana prasarana sementara alokasi anggaran untuk kegiatan KKP dalam rangka meningkatkan angka konsumsi produk perikanan, kami menilai belum optimal. Menurut kami sebaiknya alokasi anggaran untuk peningkatan konsumsi produk perikanan perlu ditambah karena hal ini dapat membangkitkan ekonomi dan meningkatkan daya beli bagi para nelayan atau pembudi daya ikan.

Seperti kita ketahui pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang mengalami kontraksi pada kuartal kedua akibat pandemi dan sektor perikanan juga mengalami kontraksi sebesar 0,63% jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun 2019 yang tumbuh 6,24%. Pada Kuartal pertama tahun 2020 sektor perikanan tumbuh sebesar 3,52% memang ini tidak buruk tapi kami berharap sektor perikanan bisa tumbuh lebih baik seperti sektor pertanian karena kami menilai dua sektor ini memiliki peranan penting dalam menyokong ketahanan pangan, memperkuat ekonomi dan memperkecil peluang resesi.

Yang kedua juga kami menyampaikan lebih lanjut adanya program-program bantuan pemasaran bagi UMKM yang bergerak di sektor perikanan, mohon ditingkatkan oleh KKP. Kami memerlukan pemaparan lebih dari Pemerintah untuk tahun 2021 apakah ada program bantuan untuk menggerakkan kembali sektor UMKM bidang perikanan? dan yang ketiga terkait serapan anggaran tahun 2020 seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Suhardi Duka tadi memang kami ini sering kali ditanya oleh konstituen yang ada di Dapil terkait program-program yang sudah direncanakan oleh Kementerian KKP sampai hari ini memang belum dirasakan oleh mereka. Terkait dengan bioflok, benih ikan juga belum sampai ke kelompok yang sudah kami usulkan beberapa waktu yang lalu, pakan ikannya sudah sampai pak tapi benih ikan nya belum. Jadi ini mohon nanti diperhatikan, nah ini program-program yang bisa diberikan kepada masyarakat.

Dan yang terakhir kami berharap untuk anggaran atau program 2021, kami ini Dapil Jawa Timur 8 yang Anggota di Komisi IV ada 4 orang Anggota yang mana dapil kami memang tidak ada laut. Jadi program-program untuk kami tidak punya nelayan, jadi kami juga tidak membutuhkan kapal pak, Pak Menteri, tapi program-program yang lain untuk pemberdayaan masyarakat baik itu gemar ikan yang bisa kita berikan, usulan dari Pak Ketua tadi terkait dengan desa-desa wisata yang bisa diserap ke Dapil kami kami, kami mohon itu nanti bisa diprogramkan di dan dianggarkan di tahun 2021. Intinya Dapil kami juga dipikirkan karena tidak ada laut Pak Menteri. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan dan kami akhiri.

*Wallahul muwafiq Ila aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ema, dari PPP satu-satunya.

Silakan Pak Charles.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Terima kasih Kyai.
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI, Menteri KKP dan jajaran serta BUMN yang hadir pada hari ini.

Pertama saya ingin memberikan apresiasi atas opini BPK yang menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk KKP di tahun 2019 ini, saya berharap ini bisa terus dipertahankan karena ini adalah bagian penting bagi sebuah institusi seperti KKP ini. Bapak Menteri dan jajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada bapak. Yang pertama kita ketahui bahwa Covid-19 ini menyebabkan penurunan anggaran untuk kementerian bapak yang hanya sekitar Rp4,6 triliun dan kemudian ditambah dengan PEN mendapatkan Rp474,9 miliar dan hasil yang kami dapatkan dan ingin mencermati mengingat apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tanggal 24 Agustus yang lalu yang menyatakan total anggaran PEN masih terealisasi 174,9 triliun. Kami membutuhkan repot dari Bapak Menteri KKP dan realisasi anggaran PEN sampai saat ini, berapa persen dari anggaran PEN yang sudah terealisasi? serta bagaimana langkah optimalisasi pada sisa tahun anggaran ini Pak Menteri? serta berapa persen alokasi serapan anggaran 2020 yang telah dilakukan hingga sekarang?

Kedua kami ingin memberikan juga catatan soal program dan anggaran tahun 2021 Pak Menteri. Anggaran 2021 Menurut kami tidak jauh berbeda mungkin dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada 2020 walaupun detailnya mungkin ada yang berbeda tapi kami berharap kondisi Covid 19 ini harusnya memang proyek-proyek padat karya yang melibatkan masyarakat khususnya nelayan. Pak Menteri daerah kami ini, di Dapil kami Jember dan Lumajang wilayah selatan adalah wilayah para nelayan. Mereka berharap sekali dengan kebijakan Pak Menteri kemarin soal lobster ini, petani-petani nelayan di Pantai Puger kemudian juga di Lumajang mereka ingin mendapatkan sesuatu keuntungan dari ini.

Saya kemarin reses turun ke sana, mereka sudah bikin kelompok-kelompok nelayan dan mereka ingin ada respon dari kementerian bagaimana kelompok-kelompok itu bisa dibina dan kemudian mereka mendapatkan hasil dari ini semua sehingga kalau kami secara tegas kami menyatakan bahwa kami mendukung apa yang disampaikan Pak Menteri terkait lobster ini tapi sekali lagi, ini harus kemudian bagaimana masyarakat nelayan khususnya di Dapil kami di Jember dan Lumajang bisa meningkat penghasilan mereka akibat kebijakan Pak Menteri ini? kemudian kami ingin menanggapi sedikit soal yang tadi Pak Menteri sampaikan di halaman 28 soal hasil operasi kapal pengawasan perikanan. Ini bagi kami angka yang Pak Menteri sampaikan 71 kapal yang ditangkap ini, itu menyatakan bahwa Kementerian KKP memang sangat serius untuk menangani kasus-kasus pencurian ikan dan kami melihat negara-negara yang kembali melakukan ini adalah negara-negara yang

memang apa secara kultur hampir tiap tahun ini Pak Menteri melakukan pencurian ikan di kawasan kita; Vietnam, Filipina, Malaysia. Kami berharap ada diplomasi yang lebih kuat lagi dari Pak Menteri dan jajarannya untuk berbicara dengan Pemerintah- Pemerintah tersebut agar kasus-kasus ini tidak terulang karena kami juga mendapatkan laporan bahwa terjadi peningkatan kualitas, pencurian ikan yang bagaimanapun juga akan mempengaruhi untuk kesejahteraan nelayan di Indonesia dan tentunya juga untuk pendapatan kita pada tahun-tahun yang akan datang.

Terakhir, saya ingin melihat Penerimaan Negara Bukan Pajak KKP 2020 yang menurut saya masih pada kisaran yang cukup berat di tengah Covid ini. Kami berharap dalam 5 bulan terakhir ini di tahun 2020 ini masih ada yang bisa dihasilkan oleh Kementerian KKP agar penghasilan yang sekarang 533,64 miliar ini bisa meningkat sampai Desember 2020 yang akan datang. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan Pimpinan, terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Muslim silakan, jauh dari Aceh.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI, Pak Menteri beserta jajarannya.

Pertama tentu saya memberikan apresiasi atas WTP ya 2019 Pak Menteri, yang kedua tentu kita tahu betul 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Dalam laporan Pak Menteri ini Semester I tahun 2020 ini ada satu ya peningkatan nilai ekspor Semester I dan saya lihat ini sangat bagus ya terus berkembang termasuk juga bulan Juni kemudian juga secara terus-menerus ada peningkatan yang luar biasa. Ini kita harapkan terus dari 6,2%, dari 6,9% kita harapkan terus mencapai sampai 10 sampai 20%, ini saya pikir hal yang sangat positif ya.

Kemudian dari sisi kedua adalah nilai impor, saya pikir sudah cukup bagus, sudah terus menurun artinya kita harapkan ekspor harus kita galakkan kembali Pak Menteri. Kemudian yang kedua saya melihat pertama tentu terima kasih ke Pak Menteri KKP beberapa waktu yang lalu saya dampingi Pak Dirjen Budidaya iya, Pak Slamet ya? terima kasih Pak Menteri, kita ada kurang lebih itu pengembangan budidaya udang ya di Aceh Timur seluas 5 hektar sebagai

Pilot Project waktu itu kita hadir termasuk dengan dari Kementerian Menko kemaritiman. Kita harapkan di Aceh Timur itu Pak Menteri ada sekitar 18.000 hektar tambak udang yang mangkrak artinya mudah-mudahan dengan hadirnya Kementerian KKP melalui Dirjen Budidaya ini kita harapkan yang *failed* 5 hektar ini bisa maksimum, bisa berjalan dengan bagus. Waktu itu komitmen Bupati juga serius Pak Menteri, waktu itu kalau ga salah sudah ketemu dengan Pak Menteri. Bupati Aceh Timur itu beliau ingin mendorong, saya sampaikan kalau hanya 5 hektar enggak ada, enggak usah. Beliau janji mungkin sekitar 1000 hektar akan berkembang terus bisa menjadi *pilot project* khususnya di Aceh Timur, ini Bang TA. Khalid juga memantau terus ya.

Yang kedua Pak Menteri ini mungkin masukan buat Ibu Dirjen PDS yang baru dilantik, selamat bu. Ini masih punya hutang Pak Menteri KKP ini waktu itu tahun 2019 kita bersama Pak Dirjen masih Pak Agus waktu itu, kita waktu itu ada acara gemar makan ikan, waktu itu kita sudah menyerahkan secara simbolis yaitu Mobil ATI bu, Ahli Teknologi. Ini saya ditanya oleh Bupati Aceh Utara tuh sampai hari ini belum turun tuh mobil Pak Menteri, ini tolong dicek segera. Ini sama malu juga bu karena kita waktu ada hadir 1500 orang di sana tapi sampai sekarang ini belum mobilnya, belum kelihatan bentuknya, kita udah sampai kan ada perubahan Dirjen dari Pak Agus ke Pak Nilwanto, Pak Nilwanto ke Ibu Tati tapi yang mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan bu.

Terakhir tentu menyangkut program-program lain termasuk Dirjen Tangkap, kita harapkan dukungan semaksimal mungkin. Terus terang pak khususnya kami di Aceh ini waktu itu sudah dua kali kunjungan termasuk di Lampulo Aceh Besar kemudian di IDI Aceh Timur itu keluhan masyarakat masalah pendangkalan pelabuhan perikanan di sana Pak Menteri, kenapa? karena kalau kita jumlah kapal ribuan tapi sampai hari ini harapan masyarakat itu ada bantuan ekskavator di sana supaya ini mereka bisa maksimum. Waktu itu Pak Slamet juga hadir di sana, waktu itu Pak Dedi selaku hadir Pak Hasan waktu di Banda Aceh itu, ini sampai hari ini harapan masyarakat. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa mendukung, bisa membackup supaya harapan masyarakat ini bisa direalisasikan. Mungkin beberapa hal Pak Ketua terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh salah.

KETUA RAPAT:

Waalaikum salam.

Biar sambung sesama Aceh silakan Tuan Salim, Tengku Salim Fakhry.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pak Kyai Abuya Kyai Hasan,

Pak Budi yang ganteng saat ini belum dapat jodoh,
Pak Menteri yang kami hormati dan jajarannya.

Salah satu tugas Pak Menteri, Pimpinan kami belum punya rezeki pak. Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama saya langsung ke budidaya Pak Menteri, saya belum ada melihat program revitalisasi dan modernisasi tambak di sini pak. Tambak-tambak kita hanya sistemnya tradisional. Tambak-tambak tidak diperbaiki Pak Menteri termasuk alur air dari sumber airnya, pendangkalan alur maka kami harap perlu dialokasikan anggaran pembuatan seperti kincir, pompa air, reger, saya kira kalau ini yang kita lakukan membantu petambak-petambak yang tradisional.

Menyangkut kedapil mungkin Pak Muslim tadi sudah menyampaikan beberapa hal, saya juga akan menyampaikan Aceh memiliki potensi yang besar untuk kelautan dan perikanan. Potensi ini masih tertidur Pak Menteri dan belum dikembangkan secara maksimal. Saya melihat potensi di Perikanan Budidaya darat dan laut perlu kita kembangkan hal ini selaras dengan visi dan misi Bapak Jokowi sebagai Presiden untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan, untuk itu saya berharap, saya meminta Aceh untuk diperhatikan, untuk budidaya yang mengembangkan keramba jaring apung.

Selanjutnya kami juga dari nelayan-nelayan Aceh termasuk nelayan yang tradisional baik cara penangkapan maupun kapalnya. Harapan kita, harapan saya meminta perhatian Pak Menteri terhadap nelayan Aceh khususnya nelayan Indonesia pada umumnya terutama kapal, alat-alat penangkap ikan dan sarana lainnya seperti alat penerangan bagi nelayan saat melaut di malam hari maupun di subuh hari, juga sebagai daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga tolong diperkuat. Armada kapal pengawasan disekitar perairan Aceh hingga Natuna sehingga isu kapal asing yang masuk keperairan Indonesia menjadi tidak ada isu-isu yang negatif. Kemarin kalau saya tidak salah, salah seorang bupati kami menghadap Pak Menteri kemarin Bupati Aceh Jaya, setelah menghadap Pak Menteri kami bercerita karena Pak Damrem kami pun ikut kemarin yang katanya seangkatan dengan Pak Menteri cuman beliau masih Dandrem, Bapak sudah menjadi menteri. Mungkin itu Pak Kyai yang terakhir. Hari ini Pak Menteri saya semenjak jadi Anggota Komisi IV DPR RI tidak pernah duduk disini Pak Menteri selalu disebelah kanan meja Pimpinan karena hari ini sudut pandangan kita ada staff Pak Menteri dibelakang saya maka saya tertarik duduk disini, terima kasih Pak Menteri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Ustadz Haerudin. S.Ag kalau ini ahlinya pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang terhormat,
Pak Menteri KKP beserta jajaran yang saya hormati,
Anggota Komisi IV DPR RI yang saya cintai.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal baik laporan kegiatan kita yang tahun 2020 di KKP dari sisi penganggaran maupun pagu indikatif kita kedepan di tahun 2021. Pernyataan pertama yang sering kita dengar dilaut adalah "*Jalesveva Jayamahe*" (jayalah kita dilautan) tentu ini para tentara Pak Edhy sangat memahami, tetapi saya ingin kegagahan dari sebut tentara itu gagahnya juga nelayannya karena mungkin cikal bakal tentara laut kita itu adalah para nelayan kita. Kalau sampai hari ini nelayan kita daya tahannya berat berarti nelayan kita sebetulnya dibawah batas ambang yang seharusnya. Dicontohkan dengan nilai tukar nelayan kita artinya tugas dihadapan Pak Menteri dan kita semua adalah tugas yang berat bagaimana rakyat kita yang dipesisir, rakyat kita yang jadi nelayan mempunyai martabat hidup yang lebih layak dan pantas dalam usia 70 tahun lebih Indonesia merdeka.

Yang kedua Pak Menteri ingin kami sampaikan bahwa tentu tidak banyak terima kasih yang kami sampaikan dari sisi perhatian baik dari Dirjen Budidaya dan Pak Sekjen yang mengkoordinasikan beberapa Dirjen datang ke Jabar Selatan mudah-mudahan menjadi kebaikan tetapi itu harus menjadi makna yang lebih baik termasuk selamat Pak Jaya ini sebagai Perikanan Tangkap mungkin dalam waktu yang tidak lama, mungkin mudah-mudahan tidak lagi PLT, amin. Kalau saya ingin sampaikan bahwa Pak Menteri saat itu kita menyampaikan pesan dan ajuan agenda besar pembangunan Jabar Selatan terutama di infrastruktur dan kita tunjukkan bagaimana kegagalan pembangunan pelabuhan yang ada di Nusa Manuk di Tasik Selatan, bagaimana juga belum selesainya pembangunan dan di daerah Cipatujah pun Santolo, pun di Ranca Buaya yang strategis yang dipelabuhan itu hanya 2; Pangandaran dan Pelabuhan Ratu, mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Kita ingin mendorong perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Jabar Selatan itu sesuai dengan kemampuan daya hidupnya, daya saingnya termasuk pendapatannya dan kita tahu di segala sektor apapun Jabar Selatan ini adalah bungsunya, daerah yang berbatasan dengan Samudra Hindia ini hidupnya jauh lebih mundur daripada Jabar Utaranya karena perhatian Pemerintah dulu sangat besar ke Jabar Utara, dari sektor apapun kita jauh lebih tinggi daripada Jabar Utara kecuali lautnya yang bersih itu ada di Jabar Selatan kecuali lautan yang lebih elok itu ada Jabar Selatan walaupun dembur samudranya jauh lebih tinggi dari Jabar Utara.

Kami punya tanggung jawab terhadap daerah yang tentu bagaimana harus didorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yang tentu perhatian kita adalah pembangunan. Nanti beberapa hal tentu ke depan kami ingin tanya berapa daerah Jabar Selatan yang dibangun dari anggaran tahun 2020 kemarin? karena kalau kita lihat hanya daerah Ranca Buaya yang memang ada pembangunan, sementara daerah yang lain itu Pamayang itu tidak ada. Nah ini bentuk tanggung jawab saya harus saya sampaikan karena ini berdampak

pada bagaimana pembentukan pembangunan dan kemandirian masyarakat Jawa Barat bagian Selatan.

Yang kedua Pak Menteri untuk 2021 kita mengajukan, bahkan waktu itu kita menghadirkan juga Dinas Kelautan Provinsi terutama di Bidang Perikanan Tangkap sama Balai. Tetapi kita melihat di sini di pagu indikatif yang akan dihadapi di masa depan, Perikanan tangkap itu Dirjen Perikanan Tangkap itu hanya posisinya keempat nilainya itu 700 lebih besar hal-hal yang lain. Tentu saya memaklumi dari kecilnya anggaran yang ada di KKP tapi itu juga pengertian saya bawa perikanan tangkap adalah bukan fokus tertinggi yang akan dihadirkan oleh KKP. Saya berharap kedepan 2021, bagaimana caranya kita mendorong pembangunan infrastruktur itu tidak boleh lepas dari fokus kita walaupun tentu bertahap dan fokus satu-satu, tidak semua dikasih tapi semua tidak selesai, kayak kita tukang kredit Pak Menteri.

Jadi selesaikan satu-satu mana yang terpenting, mana yang terpenting, jadi fokus anggaran terbatas satu-satu, *insya Allah* bisa selesai. Nah ini yang ingin kami sampaikan dari sisi proses penganggaran dan perhatian kita di 2021 terutama pengusulan kemarin karena dipimpin rombongan oleh Dirjen Budidaya Pak Slamet iya alhamdulillah hadir, terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu dan karirnya makin moncer, doanya orang Jabar Selatan. Terima kasih atas kehadiran dan mudah-mudahan ke depan titipannya adalah diperhatikan Pak Menteri pembangunan infrastruktur daerah Jabar Selatan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Sulaiman Hamzah silakan.

Papua.

F-NasDem (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri dan para Eselon I dan hadirin sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama saya tentu memberikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas opini WTP dari BPK atas laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2019. Kami juga memberikan apresiasi atas meningkatnya nilai ekspor dan menurunnya nilai

impor hasil perikanan pada Semester I pada tahun 2020 serta Neraca Hasil Perikanan Semester I tahun 2020 yang juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Semester I pada tahun 2019. Ini merupakan kesungguhan dari Menteri Kelautan dan Perikanan prestasi yang dicapai setelah beberapa tahun kita mengalami *disclaimer* dari Kementerian sebelumnya, terima kasih Pak Menteri.

Yang berikut tentang pagu anggaran KKP tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2020 sebelum Refocusing anggaran karena Pandemi Covid-19 yaitu sebesar 203,5 miliar. Walau tidak signifikan akan tetapi kita berharap anggaran KKP tahun 2021 masih dapat ditambah dan dioptimalkan guna mempercepat pemulihan ekonomi di sektor Kelautan dan Perikanan. Terkait dengan kegiatan prioritas KKP berdasarkan pagu tahun 2021, utamanya pada Dirjen Perikanan Tangkap ini pada rapat sebelumnya juga sempat sudah saya sampaikan tentang kebutuhan dapil di tempat saya memang banyak sekali nelayan tradisional yang perlu ditolong dan ini tidak membutuhkan sarana kapal yang besar, alat tangkap yang canggih tapi sesederhana seperti yang mereka butuhkan di daerah yaitu motor tempel dengan perahu tradisional yang biasa dipakai di daerah terpencil di kampung-kampung. Disana saya kira tidak terlalu mahal, motor tempel ketinting itu saya kira pantas untuk mereka mendapat pelayanan untuk itu karena bagaimanapun keseimbangan perlu kita buat untuk nelayan yang sudah mapan dan nelayan tradisional, ini di Papua Pak Menteri. Selanjutnya dengan rancangan penggunaan anggaran tambahan pada badan riset dan SDM kelautan perikanan terkait dengan rintisan instalasi Balai Pelatihan Perikanan, apa yang membedakan sehingga rintisan instalasi di keramasan anggaran sebesar 13 miliar?sedangkan di Mandalika hanya 1 miliar.

Pak Menteri berikut saya juga mau menyampaikan tadi sudah disebutkan tentang bidang prasehatkan. Ini di perikanan budidaya ada kegiatan 13.000 bidang prasehatkan, saya kurang paham Pak Menteri ini bidang prasehatkan ini seperti apa ini? iya perlu dijelaskan. Selanjutnya tadi juga sudah disampaikan oleh kawan-kawan Anggota tentang lobster. Ini polemik yang terjadi di masyarakat perihal ekspor lobster yang diatur dalam Permen KKP Nomor 12 tahun 2020, mohon Pak Menteri dapat memberikan penjelasan lebih detail kepada kami terkait dengan dampak positif dan negatif atas kebijakan itu, kemudian Bagaimana KKP memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menyebabkan harga benih lobster, hasil budidaya di tingkat masyarakat tidak anjlok serta benih lobster yang berkualitas tetap tersedia dan mudah untuk diperoleh nelayan dalam negeri untuk dibudidayakan.

Selanjutnya menindaklanjuti hasil reses yang sudah kami laksanakan, perlu kami sampaikan beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat dari masyarakat di dapil saya tentang kegiatan gemar ikan yang ini sungguh membantu masyarakat yang dalam situasi Covid ini mereka sangat membutuhkan dan ini diharapkan untuk bisa berlanjut untuk waktu-waktu mendatang. Di Kabupaten Merauke sebagaimana yang lalu juga pernah saya sampaikan ini hasil ikan tangkapan ini sangat melimpah, saya pernah cerita juga bahwa di sana mereka

mengambil gelembungnya tapi ikannya dibuang karena tidak ada tempat untuk menampung di daerah Wanam yang dulu sempat ditutup sama menteri sebelumnya, nah ini memang perlu ada langkah-langkah strategis untuk bisa menolong nelayan dari hasil tangkapan yang saya sebutkan tadi. Saya kira ini beberapa hal yang saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sekali lagi terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Waalaikum salam.

Saya minta teman-teman kalau masalah yang lain-lain, nanti kan kita masih ada Raker dua kali lagi, masih ada RDP dua atau tiga kali lagi dengan Eselon 1 kalau bisa siang ini kita fokus permasalahan LKPP dan program 2021. Jadi tidak perlu panjang lebar, nanti kita bahas walaupun dengan Eselon I kita kerjain dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Itu aja terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian kita sepakati jam 13.00 WIB ini skors. Kita habiskan bagaimana 30 menit ini sisa penanya ini selesai? saya minta bagaimana seluruh pertanyaan itu maksimalkan 3 menit selesai? Silakan Ibu Luluk coba berbicara *to the point*, kalau sebelumnya kan muter-muter. Fokus 2021 itu Pak Sekjen, silakan Ibu Luluk coba 2021 mau dibawa kemana ini KKP?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri dan semua jajaran yang hadir,
Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin.

Ini *to the point* saja Pak Menteri beberapa waktu yang lalu Pak Menteri sudah menyampaikan di Komisi IV yang terkait dengan kebijakan Pak Menteri untuk melakukan ekspor beih lobster, yang saya mau tanyakan justru desain besar dari kementerian ini untuk bisa kapan ekspor benih itu bisa dihentikan? dan yang kedua bagaimana dan seperti apa upaya KKP untuk bisa mendorong budidaya lobster itu sehingga yang kita ekspor tidak lagi benihnya tetapi lobster yang sudah dewasa? nah itu ya. Kemudian kenapa ini penting? karena memang konon 70% pasar lobster dunia itu dari Vietnam, sementara kita tahu Vietnam itu justru benihnya itu dari Indonesia. Kita tidak ingin seperti itu dan kita balik maunya peta dunia itu jadi 70% nya harusnya itu dikuasai oleh Indonesia dan okelah 30% nya itu Vietnam.

Terus yang kedua saya juga masih belum tahu, mungkin saya kurang detail begitu bacaannya adalah proyeksi capaian produktivitas ata pun juga

sumbangan dari sektor perikanan terutama tangkap ataupun budidaya yang dari KKP. Lagi- lagi memang *branchmark* saya itu Vietnam bapak sebelum Covid itu Vietnam itu bisa 9,5 billion USD perolehan mereka dari sektor perikanan tangkap dan Indonesia itu hanya separuhnya. Padahal tadi seperti disampaikan oleh Mas Fransiskus Lema bahwa *cost line* kita ya dan kekuatan perikanan kita, wilayah laut kita itu udah ga ada apa-apanya lah kalau kemudian dibandingkan dengan Vietnam, bagaimana kemudian kita punya semangat ini untuk bisa membalik keadaan? dan kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pak Menteri terutama menyiapkan itu semua untuk anggaran di 2021.

Nah yang ketiga saya mendukung juga yang sudah disampaikan oleh Bang Haerudin karena kebetulan saya menyiapkan bahwa selama ini orientasi kita untuk memperkuat sektor kelautan ini menganaktirikan jalur selatan Pak Menteri. Dulu pernah kita Raker beberapa kali dan itu sudah saya sampaikan, bahkan ada usulan yang sangat menarik dari beberapa daerah untuk mencoba membuat jalur pelayaran perintis yang itu melibatkan beberapa kabupaten yang di jalur selatan. Jadi jalur selatan sampai Banyuwangi sampai Bali itu yang tidak dilakukan padahal kalau ini dilakukan itu pasti akan menggerakkan semua sektor yang ada di selatan itu termasuk juga kesejahteraan nelayannya, infrastrukturnya harus terkoneksi dan lain sebagainya. Nah bisa nggak kemudian Kementerian KKP ini mengambil inisiatif bersama dengan kementerian yang lain untuk memastikan bahwa ada konektivitas pembangunan infrastruktur di jalur selatan itu sehingga bisa meningkatkan perekonomian terutama dari sektor perikanan dan kelautan di jalur selatan karena yang utara itu udah over bapak sementara yang selatan ini belum.

Oleh karena itu kita mendorong dan meminta KKP untuk membuat semacam peta potensi yang dimiliki oleh jalur selatan ini apa? selatan jawa. Iya jadi keanekaragaman baik itu hayatinya ataupun juga perikanan daratnya dan seterusnya termasuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan jalur selatan itu apa saja? nah yang berikutnya saya memberikan dukungan juga tadi kaitannya dengan program diperbesar untuk masyarakat misalnya program bioflok kemudian juga budidaya perikanan darat karena saya lautnya itu kecil tapi bukan berarti enggak ada karena tadi di anak tirikan yang di Wonogiri itu sampai terhubung ke Pacitan sebenarnya tetapi mentok sampai di sana, padahal yang namanya lobster itu pernah dilakukan oleh para nelayan di sana dan kerja sama dengan induk koperasi Polri pak tetapi karena tidak ada dukungan yang memadai. Cara menangkapnya lobster aja masih merayap ke tebing yang sangat curam, tidak pakai alat keselamatan dan juga tidak ada bantuan menangkapnya sehingga sudah pernah terjadi beberapa nelayan itu jatuh dan meninggal ditelan oleh laut gitu. Iya cuman ini nggak ada eksposnya karena memang kepala daerahnya tidak mau ini jadi skandal tetapi saya kira negara harus hadir dan KKP saya mohon mungkin perlu ditengok kondisi di sana Pak Menteri. Cukup, tapi yang terakhir boleh sebelum cukup ada usulan yang sangat menarik terkait dengan gemar ikan bapak.

Jadi gemar ikan itu bukan hanya sekedar gimana kita kampanye gemar ikan tetapi tolong dibantu masyarakat juga untuk menjadi pusat-pusat atau

basis-basis produksinya. Ada gagasan yang menarik untuk pelibatan misalnya tokoh-tokoh agama dan juga kelembagaan-kelembagaan berbasis keagamaan. Iya mau agama apa aja, mau itu muslim, non muslim, pesantren, padepokan, gereja dan sebagainya. Kalau sekiranya misalnya pesantren itu dibekali dengan program bioflok itu akan bagus. Yang kedua andaikan saja setiap masjid pak karena mereka juga punya halaman dikasih katakanlah 4 saja kolam itu sudah akan bisa memberdayakan para jamaahnya dan ini juga bisa mendorong untuk percepatan hobi makan ikan dan sekaligus juga mungkin mendukung untuk program pengurangan *stunting*, daerah saya masih 3 9% Pak Ketua *stunting*-nya. Jadi saya kira itu terima kasih.

Wallahul muwafiq Ila aqwamith Thariq.
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Yang telah belajar bijak bicaranya fokus ke KKP tidak luar negeri. Silakan Mas Ichsan, jangan ceramahi kuliah S3 ya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri yang saya hormati, para Pejabat Eselon I, Pimpinan Komisi yang saya hormati.

Ada tiga, saya *to the point* saja Pak Menteri terkait dengan apa yang kita evaluasi selama 5 tahun kebelakang. Selama 5 tahun kebelakang kita melihat bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ini berorientasi pada bagaimana pemberantasan *illegal fishing*. Pada konteks itu mungkin iya tetapi kemudian menjadi persoalan banyak yang bukan dikorbankan tapi di pinggir kan begitu oleh Kementerian Kelautan sebelumnya dan yang paling penting sebenarnya menurut saya adalah pembangunan infrastruktur perikanan dan kelautan yang 5 tahun nyaris menurut saya bermasalah. Pertama yang saya ingin lihat misalnya saja renovasi atau perbaikan tempat pendaratan ikan di daerah.

Saya sudah mengingatkan Pak Menteri dan sepengetahuan saya 5 tahun yang lalu sebenarnya adalah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus. Di dalam menunya Pak Menteri hari ini, kelihatan saya tidak melihat ada hal seperti itu kalau budi daya iya *fine* tetapi 5 tahun yang lalu diambil alih oleh Kementerian yang lain. Saya minta karena berdasarkan Undang-undang Perikanan ini sebenarnya kewenangan Kementerian Teknis. Kalau kita boleh Kunker karena pandemi teman-teman didaerah yang punya laut banyak sekali infrastruktur yang bermasalah terutama pelabuhan perikanan provinsi atau pelabuhan perikanan kalau nusantara kan punya pusat tetapi diprovinsi dan kabupaten kota. Saya

minta menu ini perlu ditampilkan, perlu diusulkan. Nah ini sebenarnya menurut saya tugasnya Pak Sekjen ini pak menyakinkan bahwa sesungguhnya kewenangan Dana Alokasi Khusus untuk infrastruktur pelabuhan didaerah kabupaten kota. Waktu itu kita pernah ke Aceh mana gitu, itu bupatinya sudah berteriak pak. Saya tidak ingin bicara dapil saya karena dapil saya di Bogor pak, tidak ada laut begitu Pak Menteri tetapi seluruh wilayah kita ini, infrastruktur pelabuhan kita ini bermasalah pak. Saya tidak ingin bicara bagaimana kemudian ada tumpang tindih kewenangan Pelindo dengan Dirjen Perikanan Tangkap, itu yang pertama pak.

Yang kedua adalah tetapi hasil-hasil penangkapan kapal-kapal ilegal kita. Dari sekian yang dilaporkan oleh Pak Menteri tidak ada satu pun kapal Cina pak padahal kita tahu isu di WWP 718 di Kepulauan Natuna sana itu banyak dominan katanya Kapal-kapal China. Problemnya apa ini pak? apakah infrastruktur kapal pengawas kita yang lemah yang tidak ada? atau monitoring kita yang lemah atau kecepatan Kapal China yang lebih cepat daripada kita? yang ketangkap ini Vietnam rata-rata pak, lebih banyak Vietnam, tetapi Cina tidak ada. Apakah kita kemudian kita kalah dengan *cost guard*-nya China atau apa? kalau memang infrastrukturnya kita kurang, iya kita perbaiki pak karena ini masalah kedaulatan kita pak, itu yang kedua.

Yang ketiga terakhir pak, terkait dengan bagaimana pembangunan infrastruktur disekitar pelabuhan perikanan. Terkait misalnya pengadaan *cool storage* misalnya saja. Saya setuju pak kalau itu *cool storage* dalam skala besar tapi dalam skala kecil pun menurut saya juga penting dan kita perlu ada *mobile cool storage* karena TPI I, TPI yang lain itu juga banyak yang kecil-kecil itu artinya secara dalam 5 tahun kebelakang ini pak, kita juga melupakan hal itu. Saya setuju illegal fishing tapi sudah cukuplah hari ini, cukup diperkuat ada di pengawasan tetapi pada saat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat pembangunan kelautan perikanan ini penting dan ini menurut saya kalau Pak Menteri bisa melakukannya selama 5 tahun, Pak Menteri punya *legacy* bagaimana caranya agar perikanan dan kelautan kita ini lebih kuat dengan percepatan infrastruktur yang ada. Makasih Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikum salam.

Selanjutnya Ibu Nur'aeni fokus pada saat kita kunjungan. Biar 3 menit cukup Serang aja yang sampeyan titipkan aspirasinya.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang bagi kita semua.

Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota Komisi IV DPR RI,
Pak Menteri beserta jajaran Eselon I.

Langsung karena disuruh fokus, saya fokus. Yang pertama tentu apresiasi atas WTP yang diperoleh berikutnya saya mencoba mengevaluasi program dan kegiatan di 2020. Sepandangan dengan Pak Suhardi bahwa di daerah itu saya belum melihat kehadiran KKP untuk bisa memberikan program dan bantuan kepada masyarakat nelayan. Kalau dari beberapa Dirjen hanya Dirjen Daya Saing saja yang sudah program kegiatan yang sudah disusun kemarin yaitu gemar makan ikan, yang luar biasa yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah tentu dalam hal gemar makan ikan ini juga di samping untuk di bisa ditingkatkan dari kuantitas, dari sisi kualitas juga mohon untuk diperhatikan.

Kaitan nilai ekspor yang naik memberikan apresiasi, tentu ini juga akan menyumbang dari sisi penerimaan negara bukan pajak. Yang ingin saya ketahui sektor mana saja yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan PNPB ini? karena ada salah satu mungkin, jenis ekspor yang ada di wilayah Banten yaitu kaitan rumput laut. Yang ingin saya tanyakan bentuk *supporting* seperti apa yang dilakukan oleh KKP terhadap ekspor rumput laut yang ada di wilayah Kabupaten Serang? kalau tidak salah di Tanara. Mohon kiranya saya bisa mendapatkan penjelasan secara transparan karena saya melakukan pengawasan langsung sepertinya masih belum bisa di dalam ya, masih ditutupi masyarakat di sana ataupun pengusahanya tidak mau memberikan informasi. Nah ini mungkin yang perlu saya ketahui secara detail, stimulus-stimulus apa yang dilakukan? jangan sampai hanya sebatas menggugurkan kewajiban dari kegiatan-kegiatan yang ada untuk bisa dilaporkan. Sebetulnya masyarakat di sana sudah bisa mengolah sendiri akan tetapi klaim-klaim yang dilakukan oleh KKP bahwa ini adalah bentuk pembinaan pemberdayaan dilakukan oleh KKP terhadap peningkatan ekspor budidaya rumput laut.

Dan berikutnya saya sepakat untuk di 2021 karena ada juga kegiatan yaitu pembelian alat tangkap ikan. Apakah memang ini juga programnya sama dengan rencana yang akan dilakukan oleh Pak Menteri? setahu saya di media lokal diberitakan bahwa Pak Menteri melakukan peninjauan terhadap pabrik yang ada di wilayah Cikande. Kebetulan juga itu adalah wilayah saya, dapil saya. Nah tentu saya juga ingin mendalami apakah kegiatan tersebut sama dengan kegiatan di 2020? karena cukup lumayan besar ya anggaran serta kuantitasnya kurang lebih 3 ribuan. Nah mohon kiranya apakah alat deteksi ikan ini di 2020 yang sudah disurvei Pak Menteri ini sudah digulirkan ataupun memang akan digulirkan di 2021? walaupun memang itu akan diluncurkan dan program tersebut akan di realisasikan, mudah-mudahan alatnya ini bisa terpakai dan tidak mengganggu ekosistem laut yang ada.

Untuk 2021 saya sepakat tadi dengan Pak Ichsan serta teman-teman yang lain kiranya diperkuat yaitu kegiatan-kegiatan di samping produksi nilai

konsumsi ikan juga, nilai konsumsi masyarakat terhadap konsumsi ikan ini juga mesti ditingkatkan karena di Banten kita tahu walaupun sudah memenuhi rata-rata nasional tingkat provinsi tapi di kabupaten kota ini masih rendah dan pembangunan rehabilitasi sarana prasarana pokok unit perbenihan juga, peningkatan usaha kelompok pengolah pemasaran perikanan, insentif dan subsidi kepada nelayan karena kebijakan yang akan dilakukan adalah pemulihan ekonomi nasional tentunya mudah-mudahan KKP bisa mengalokasikan untuk insentif dan subsidi kepada nelayan. Dan terakhir untuk mohon menjadi perhatian diberikan kaitan program penguatan infrastruktur perikanan. Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan karena Pak Bagus masih telepon, Bu Renny silakan bu.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.P.N.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran di KKP.

Sebelumnya saya memberikan ini menyampaikan kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan KKP, ini adalah suatu prestasi yang membanggakan.

Pak Menteri yang saya hormati.

Sebelumnya saya menyampaikan amanat dari Masyarakat Sumatera Selatan Bapak, salam hormat buat Pak Menteri dari masyarakat yang telah menerima program Padat Karya Mina Padi, karena ini amanat jadi saya sampaikan langsung.

Pak Menteri yang saya hormati.

Berkaitan dengan program mina padi, saya melihat di rancangan penggunaan anggaran tambahan tahun 2021, ini saya lihat ini adalah hanya ada 50 unit pak. Nah sementara saya menyampaikan aspirasi dari Masyarakat di Sumatera Selatan justru program ini, program yang sangat diminati justru kami meminta program ini justru ditambah pak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan Dirjen Perikanan Budidaya, Sumatra Selatan ini merupakan daerah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk perikanan budidaya pak. Ikan sudah menjadi kebutuhan dimasyarakat Sumatra Selatan. Nah untuk mengembalikan citra Sumatra Selatan seperti dulu, seperti

yang pernah Pak Menteri sampaikan kepada Masyarakat Sumatra Selatan mengenai budidaya Ikan Belida dan Ikan Gabus pak, saya juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat pak mohon program ini disegerakan pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.)

Bu Reni kalau bisa tidak usah bicara masalah program tetapi fokus kepada anggaran 2020, nanti pendalamannya pada saat Eselon I. Tadi kalau bilang ada 50 paket iya kita minta jadi 150 paket dibagi untuk Anggota. Kalau tidak dibagi jangan rapat lagi sama Pak Edhy, iya gitu aja.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.P.N.):

Siap terima kasih Pimpinan.

Yang terakhir Pak Menteri sama seperti teman-teman yang tadi, saya juga untuk program gemar ikan ini Pak Menteri juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perikanan karena kegiatan ini juga sangat diterima baik oleh masyarakat dan ini juga saya juga menyampaikan bahwa sama seperti teman-teman yang lain program ini juga tetap diteruskan. Terima kasih Pimpinan itu saja.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om swastiastu.*

Yang saya hormati Pak Menteri.

Pertama-tama saya minta maaf waktu bapak datang ke Bali tidak bisa menemani atau dampingi karena ada program Komisi IV ke Jabar, nah itu? jadi itu. Jadi saya ingin memperdalam saja Pak Menteri, memperdalam saja apa yang disampaikan teman-teman.

Yang pertama, program di ESDM perlu ditingkatkan pak karena kemarin pelatihan yang biasanya kita laksanakan tentang budidaya secara langsung, kemarin kita sudah dilaksanakan secara virtual sangat terbatas sekali perlu ditambah anggarannya karena itu merupakan ujung tombak dari kesuksesan Bapak di dalam bidang masyarakat.

Yang kedua terkait dengan lobster pak, tadi teman-teman sudah banyak bicara. Saya cuman memperdalam saja pak, jadi kondisi lobster kita sekarang, bapak kebijakan bapak melakukan ekspor adalah tuntutan ekonomi pak, kita sependapat.

Terkait hal itu dalam kurun waktu karena kita kelebihan benih ini ya satu-satunya jalan adalah untuk menyetop atau mengurangi ekspor itu adalah meningkatkan budi daya lobster itu sendiri. Lah jadi kami di Bali sedang mencanangkan rumah dan Kampung lobster pak. Jadi kalau Pak Cicip dulu wujudkan Kampung Lele Pak di Gianyar, Pak Syarif mungkin masih ingat kita melakukan pelatihan 100 orang di situ pak.

Nah jadi dengan biaya yang sangat rendah sekali dengan karamba 4 x 4 tinggi 4 meter, sudah itu kita kalau sekarang yang kita sudah dilaksanakan di Bali hanya 1 juta per 2 keramba, ini sangat murah sekali. Nah ke dalam kebijakan bapak di dalam meningkatkan apa yang diharapkan oleh temen-temen, nah ini sangat memungkinkan sekali pak kita laksanakan karamba jaring apung atau karamba tenggelam. Nah jadi setiap rumah tangga membuat dengan dua karamba saja sudah nilainya tinggi-tinggi banget pak.

Terkait dengan hal itu mungkin kami apa yang kami sedang lakukan, saya mengundang Bapak Menteri, saya mengundang Pimpinan, saya mengundang rekan-rekan semua kalau program ini dilaksanakan di seluruh Nusantara, bisa akan membantu untuk pembayaran utang luar negeri kita pak. Ini jadi kita sudah penelitian walaupun tidak begitu banyak apalagi dengan teknologi yang bapak punya di KKP saya berkeyakinan pak, kita akan bisa survive di bidang lobster ini, nah untuk itu mungkin bisa dijadikan program kunjungan kita reses nanti, kita panen lobster di Gerogak. Kita lihat dan saya akan jelaskan secara detail apa yang kita sudah dilaksanakan disana, sekian terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oke cukup?

Selanjutnya Pak Slamet dari Madura singkat. Jadi kemarin anda bicara masalah garam waktu Paripurna, sekarang tidak perlu lagi bicara itu kongkritnya apa? itu aja. Pak Menteri saya minta bantuan ini, itu aja ngomongnya. Silakan.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Abah Sudin Pimpinan Komisi IV dan Anggota DPR RI yang saya hormati, Bapak Menteri beserta jajarannya yang kami hormati dan kami banggakan.

Singkat saja pak karena ini sudah ada *warning* dari Abah Ketua nggak bisa nolak, cuman menjadi permasalahan klasik bagi kami karena kami membawa sampel garam Pak Ketua dari Madura. Jadi kebetulan hari ini saya bukan hanya berbicara program 2020 tapi juga bagaimana 2021 ini kami minta bagaimana ada sikap tegas dari Bapak Menteri sesuai dengan visi ataupun

cita-cita Bapak Menteri untuk memberdayakan dan memerdekakan para petani, karena kita lihat pada tahun anggaran APBNP tahun 2020 ataupun 2021 ini garam ini tidak menjadi *project* utama bahkan yang menjadi *project* utama itu adalah kawasan tambak udang dan Udang MSF.

Jadi yang kita inginkan bagaimana garam ini bisa menjadi program prioritas juga untuk 2021, ketika kita lihat pada APBNP yang menjadi program prioritas untuk garam ini hanya ada 16 unit perbaikan Gudang Garam dan pada pada anggaran tahun 2021 ini ada 32 unit.

Nah urgensinya dimana? kok hanya yang menjadi prioritas hanya perbaikan gudang, gudang, gudang itu saja. Tentunya kita harapkan bagaimana di sini ada Trio Slamet; ada Slamet dari PKS, ada Slamet dari Perwakilan Kementerian tentunya ini mampu untuk menyelamatkan para petambak garam untuk bisa mendukung bagaimana menteri ini lebih baik dan lebih Pro kepada petambak garam dan kita lihat bersama pada halaman 24 dalam program riset dan pengembangan sumber daya manusia pada anggaran APBNP 2020 di sini ada 10.000 untuk pengembangan sumber daya riset dan ada 29 ribu orang pada anggaran 2021. Kami belum melihat secara jelas dan rinci bahwasanya petambak garam ini masuk dalam *cluster-cluster* untuk pengembangan sumber daya manusia di sini. Kita harapkan bagaimana petambak garam ini dimasukkan untuk bisa diberdayakan. Selain garam, Madura mungkin belum pernah diketahui bahwasannya di Kepulauan Madura ini ada Pulau Sosiil namanya di situ sebagai salah satu memiliki berproduksi rumput laut yang luar biasa dengan jenis Kotoni. Ini kami juga butuh sentuhan dari Pemerintah baik bagaimana pengolahan ataupun bagaimana pangsa pasarnya.

Jadi hari ini di sana jenis Kotoni ini harga basah ini 200 kilo, 200 per kilo dengan keringnya Rp500 dengan Rp15.000 harga kering. Jadi kami kebingungan untuk mencari eksportir ataupun pangsa pasar.

Yang ketiga terkait masalah apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi saya mengapresiasi apa yang dicanangkan oleh Bapak Menteri dan jajarannya terkait adanya gemar ikan. Tentunya kami harapkan bagaimana dengan adanya gemar ikan ini di 2021 ini mampu untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada misalkan ada sekolah perikanan, mereka mampu untuk dibina, bagaimana ada pengolahan sama dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Lulu ataupun masyarakat perlu ada titik lanjut ataupun program lanjutan dari adanya gemar ikan biar tidak seakan-akan hanya menjadi acara *ceremonial*.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Yang terakhir Ketua, Pimpinan terkait masalah *cool storage*, ini harus menjadi perhatian khusus bagaimana anggaran di 2021 ini *cool storage* untuk tidak menjadi salah tempat karena adanya ikan itu di Kepulauan ataupun di daerah laut Ketua bukan di darat dan yang terakhir adalah saya mempertanyakan bagaimana dan apa kabar mimpi poros maritim dunia? sekian *mator sakalangkong*.

*Wallahul muwafiq Ila aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Ketua, perkenankan nanti saya untuk menyampaikan.

KETUA RAPAT:

Nanti disampaikan untuk dicoba sama Pak Edy makan siangnya.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.) :

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Slamet ya tadi usulannya supaya *cool storage* jangan ditaruh di darat. *Insyah Allah* nanti akan datang agar ditulis untuk Madura *cool storage* agar taruh ditengah laut.

Selanjutnya Pak Slamet dari Fraksi PKS.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih.

Yang saya hormati para Pimpinan sidang,
Anggota dewan yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya yang saya hormati juga.

Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama memberikan apresiasi terhadap pencapaian WTP dari BPK sekaligus juga memberikan apresiasi atas kinerja yang telah mengamankan laut kita. Beliau menyampaikan 71 kapal ilegal sudah berhasil dan tentunya ini juga menjadi harus menjadikan apresiasi bagi kita di di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang diberikan KKP tahun 2020 ini, namun tentunya juga kita perlu memberikan persentase keberhasilan itu seberapa dibanding dengan yang belum tertangkap ini, sekali lagi apresiasi kepada Pak Menteri.

Yang berikutnya Pak Menteri, saya ingin menyoroti pertama terkait dengan program yang ada di riset dan pengembangan SDM 2021. Saya lihat ini sangat kecil sekali, di antara program itu di riset dan pengembangan SDM, risetnya itu hanya 3 M catatan saya, mohon kalau salah nanti diluruskan dari anggaran 35 sekian M sehingga hanya kira-kira 8%, sementara untuk riset inikan semestinya akan memberikan support yang luar biasa untuk pengembangan ke depan. Ini catatan saya sehingga kemungkinan apakah tidak mungkin kemudian untuk ditambah untuk riset dan pengembangan SDM.

Berikutnya terkait dengan bantuan kapal 105 unit, ini mungkin perlu diperhatikan adalah terkait dengan nanti kebutuhan pertama; kebutuhan nelayan, yang kedua dari sisi kapasitasnya. Tentunya kita berharap belum adanya pemanfaatan yang maksimal oleh para nelayan kita karena terkait dengan kepemilikan kapal dari sisi ukurannya sehingga bantuannya apakah nanti 30 gross atau berapa itu yang perlu dipertimbangkan, artinya kita ingin meningkatkan kelas dari nelayan kita, ini yang mestinya seperti itu.

Berikutnya juga di seluruh program ditjen, saya menemukan ada pendataan. Kalau di Ditjen Perikanan Budidaya adalah pendataan bidang perikanan budidaya kemudian di desain peran perikanan tangkap juga ada pendataan bidang perikanan tangkap dan hampir semua Ditjen ada program pendataan terkait dengan bidang masing-masing, apakah dalam rangka efisiensi tidak disatukan di setjen misalnya? dan dari sisi pengambilan data, saya khawatir juga netralitasnya akan terganggu artinya validitas kalau anak buah kita yang mencari data, asal bapak senang tapi kalau dipihak lain misalnya Sekjen yang mengkoordinasi itu apakah mungkin juga menjadi di samping efisiensi mungkin akurasi dari data ini juga bisa kita dapatkan. Total saya lihat, total dari itu ada 15,3 dimasing-masing ditjen yang ada, apakah perlu, tidak perlu disatukan? Itu.

Berikutnya juga terkait dengan beasiswa aparatur ini Pak Menteri, jadi tahun 2020 ada 195 orang. Di 2020 ini diprogramkan 180, apakah ini orang baru atau menjadi kelanjutan? ini mungkin perlu penjelasan dan terakhir terkait dengan pelatihan yang sudah dilaksanakan saya juga menyampaikan terima kasih, kenapa? mohon pakai mic pak tidak dengar pak.

ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Yang 180 itu tadi apa pak? mohon diulangi pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Beasiswa aparatur negara, iya itu ada 180 orang itu di 2020. Rencana 2021 sementara saya lihat di program 2020 itu ada 195 orang artinya ini perlu penjelasan apakah orang yang berbeda atau apa ini? karena setiap tahun ada selalu ada program itu. Terakhir Tentunya saya juga menyampaikan terima kasih ada program pelatihan hanya mungkin dari pelatihan ini pak perlu ada *follow up*. Jadi maksud saya kalau bukan mengabaikan arti penting dari pelatihan tetapi dengan teknologi yang sekarang pelatihan itu bisa didapatkan

dengan mudah hanya juga yang menjadi permasalahan adalah setelah pelatihan. Kemarin saya juga mendapatkan 2 pelatihan, nah yang ditanyakan berikutnya support dari untuk melaksanakan atau aplikasi dari pelatihan ini tentunya tidak sekedar support modal tetapi support peralatan yang akan bisa melaksanakan itu sehingga titik-titik pelatihan itu mungkin perlu dianggarkan untuk memberikan bantuan terkait dengan peralatan yang sudah dilatih karena dari sisi *skill* hari ini itu mudah kita untuk mengakses itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, terima kasih Pimpinan atas waktunya dan Pak Menteri.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Waalaiikum salam warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih Pak Slamet.

Pak Muhtarom silakan mbah, 3 menit mbah.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang saya hormati Pak Menteri dan jajaran Kementerian KKP,
Bapak Ibu semuanya.

Yang pertama mengapresiasi atas opini WTP lompatan yang luar biasa dari *disclaimer* tidak melalui WDP tapi langsung WTP. Berikut tidak bermaksud apa-apa melihat formula di anggaran APBN kita ini ada 2700 sekian T kemudian di Mitra Komisi IV ini total tidak lebih dari 30 T. Melihat dari sisi ini tentunya keberpihakan kepada pertanian dalam arti luas yaitu pertanian pangan, Kementerian KLHK, KKP ini 2.186 sekitar 27 saja, iya kurang lebih 30-lah begitu. Ini kalau bisa berjuang di mitra kita ini 5% saja ini sudah lumayan bagus kisaran 135 pak, ini cuman 5% saja. Di waktu saya pernah menjabat itu formula APBD itu; pendidikan 20%, kesehatan 10% kemudian pertanian 10%. Nah ini kita ke depan mencoba biar proporsional lah begitu, ujung-ujungnya wah ini saya tidak bermaksud apa-apa, ujung-ujungnya yaitu bagaimana kami yang tidak punya laut seperti yang disampaikan oleh Mbak Ema tadi, Dapil ya pada umumnya Jawa Timur yang tidak punya laut itu konsumsi ikan di bawah 20 pak rata-rata termasuk Madiun ini kisaran kabupaten 15, kalau kota itu juga sekitar itu. Kemarin terima kasih diwaktu gemar makan ikan disertai setup sekaligus di situ sosialisasi bahwa makan ikan dari perikanan ini kandungannya komplit begitu dibandingkan dengan makan ikan yang lain. Maka dalam rangka untuk mengurangi laju *stunting* kemudian dalam rangka pertumbuhan kecerdasan anak maka gemar ikan ini terus dilanjut dan sekaligus disertai setup untuk sosialisasi seperti kemarin itu luar biasa.

Kemudian juga perlu di sini khususnya Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Penguatan Daya Saing ini bagaimana anggarannya bisa ditambah? karena yang tidak punya laut ini ada di luar Dirjen ini ya yang bisa mengakomodir kepentingan wilayah yang tidak mempunyai laut. Mohon maaf ini saya tidak bermaksud dikotomi kewilayahan atau program tapi biar agak proporsional begitu kalau yang punya laut itu satu kapal saja sudah sekian miliar tapi ia memang di daerah yang tidak punya laut masih banyak komoditi yang bisa dikembangkan tapi memang saat ini yang namanya nelayan dan petani itu pada umumnya menjadi kantong kemiskinan, ini yang harus kita jawab bersama. Mungkin ini Pak Menteri yang dapat saya sampaikan Pimpinan, jadi intinya program yang ada di Dirjen Penguatan Daya Saing khususnya gemar ikan kemudian bantuan peralatan pengolahan, ini sesuai yang disampaikan Pak Slamet. Kalau kemarin kita yang sudah latihan setelah dilatih ini ya ada *follow up*? di sini ada program peralatan pengolahan sederhana, ini saya pikir masuk juga, kemudian bioflok ini juga sangat cocok untuk wilayah yang tidak punya laut, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikum salam.

Sampeyan ini lebih semenit mbah.

Terima kasih Mbah Tarom.

Silakan Pak Andi Akmal, sebelum yang terakhir nanti Pak Narno kapoksi partai penguasa perlu diberi waktu. Pak Narno tadi bisik-bisik kesaya waktu lewat, silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Makasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Pak Menteri beserta dengan jajaran,
Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia.

Yang pertama saya tidak memberikan apresiasi karena sudah tadi disampaikan teman yang lain begitu pun dengan ucapan terima kasih. Saya menyoroti Pak Menteri kontribusi sektor perikanan terhadap PDB yang mengalami kontraksi minus 0,63%, ini data BPS pak bukan data saya. Jadi mungkin ada penjelasan walaupun tadi disampaikan bahwa ekspor bagus kemudian juga yang lainnya bagus tapi secara data di kuartal kedua ini kita

minus pak. Kita berharap dikuartal ketiga nanti positif, mungkin Pak Menteri bisa menjelaskan pada kita semuanya langkah-langkah apa yang akan kita ambil? sehingga kontribusi sektor perikanan ini bisa positif di kuartal ketiga, itu yang pertama Pak Ketua.

Yang kedua kalau kita melihat besaran anggaran Kementerian KKP mengalami kenaikan sedikit, cuma 1 triliun. Saya kira ini bukan jumlah yang besar karena kebutuhan kita itu sektor perikanan dan kelautan sangat besar Pak Ketua pak. Kita melihat anggaran kabupaten sangat kecil, anggaran provinsi sangat kecil untuk sektor perikanan dan kelautan ini, jadi kalau dari pusatnya yg tidak maksimal ke daerah pak, apa yang dirasakan oleh nelayan kita gitu? Jadi sebenarnya saya secara pribadi berharap masih ada tambahan nanti anggaran untuk Kementerian KKP ini dari 6,4 mudah-mudahan bisa sampai 7 atau 8 triliun, iya. Pernah 12 triliun di tahun anggaran 2014 kemarin ya pak 2014, kita berharap bisa kembali ke sana.

Kemudian yang kedua, saya ingin penjelasan Pak Menteri juga bagaimana pengelolaan ruang laut kita di Zona Ekonomi Eksklusif kita gitu? yang dimana nelayan asing itu diberikan izin untuk menangkap iya? nah gimana kemampuan dari pada nelayan kita bagaimana *upgrading* daripada kapal-kapal kita ini sehingga dia bersaing nanti disana? bisa datang ke daerah kita ini untuk menangkap ikan, itu. Mungkin dari Pak Menteri nanti bisa menjelaskan.

Yang ketiga selama ini keluhan tentang masalah pupuk kepada petambak yang mempunyai lahan tambak itu 1 hektar ke bawah, kita berharap semuanya Pak Menteri kedepannya melalui Menteri Keuangan tentunya ada subsidi pupuk untuk petambak pak. Iya memang terpisah dengan Kementerian Pertanian, selama ini sebenarnya gabung dengan Menteri Pertanian. Jadi di Kementerian Pertanian kurang kemudian diberikan lagi kepada KKP sehingga ini masih banyak petambak kecil kita tidak mendapatkan pupuk subsidi. Jadi mudah-mudahan ke depannya ada khusus untuk minimal mungkin 500 ribu ton atau 1 juta ton, ini kan sudah cukup besar ya daripada anggaran negara yang cukup besar itu yang tidak terealisasi mending diberikan kepada petambak kecil kita gitu.

Kemudian selanjutnya Pak Menteri kita berharap juga bahwa untuk PDS, ini ada Dirjen baru untuk PDS ya. Ini saya *concern* bu selama 5 tahun di Komisi IV 6 tahun, Dirjen PDS selama ini saya melihat, dirjen hanya pengadaan saja kerjanya. Kalau pengadaan kerjanya bagus nggak ada masalah tapi selain program gemar ikan ya, pengadaan yang menurut saya ini, saya melihat bahwa bantuan-bantuan yang diberikan kepada daerah terutama bermitra dengan kabupaten, saya melihat banyak yang makrak, tidak bisa digunakan begitu. Di daerah saya di Kabupaten Bone ada pabrik pengolahan rumput laut 25 miliar, ini tidak digunakan. Ada mesin pendingin tadi itu juga banyak, saya melihat Ibu Dirjen baru ini jangan kemauannya pengusaha diikuti pak, ibu tapi apa yang menjadi kebutuhannya nelayan kita. Saya melihat seperti itu, jangan hanya mengikuti apa yang akan dibagikan tapi output *outcome*-nya tidak kelihatan di lapangan begitu. Saya di daerah saya banyak bu yang dapatkan bantuan dari PDS ini tidak bisa digunakan, tidak *compatible* dengan kebutuhan daerah

begitu atau nelayan kita begitu. Jadi mungkin Pak Irjen ya bisa juga di Sulsel ini banyak juga bantuan yang tidak bisa digunakan, ini sayang sekali jumlahnya besar tapi periode yang lalu bukan periode yang sekarang, jadi untuk kedepannya tolong diperbaiki begitu ya.

Kemudian bantuan-bantuan lain saya tidak masuk ke teknis karena nanti didalam dalam Eselon I, kita ingin sebenarnya dari Kementerian Kelautan memperbanyak bantuan jumlah dan kuantitas dan kualitasnya gitu. Isitilahnya di budidaya, kita berharap petani rumput laut kita pak dapat ada di sini memang untuk bibit, tapi kita berharap juga ada pelampungnya, ada talinya gitu, karena kalau berharap dari kabupaten pak, APBD kabupaten dan provinsi ini nggak ada merahnya. Begitu membantu kapal-kapal kecil, sekarang diperbanyak saja ini apa barangnya gitu, walaupun kecil nilainya tapi banyak yang dapat daripada besar nilainya tapi yang dapat sedikit itu. Nah saya kira begitu anjuran saya ke Pak Menteri, bantuannya diperbanyak jenis kuantitasnya sehingga nelayan kita merasa ada perhatian gitu dari Pemerintah Pusat.

Yang terakhir Pak Menteri saya berharap Pak Menteri ada waktu di Kabupaten Bone pak karena di Kabupaten Bone ini ada Teluk Bone pak, pusat perikanan tangkap juga, kemudian disana juga ada pusat tambak; tambak udang maupun tambak rumput laut dan juga pusat pendidikan ada di sana pak; ada politeknik dan ada juga SUPM. Pak Menteri ini tidak hanya ke Makassar saja, tetapi bisa juga melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone untuk melihat potensi perikanan kita yang ada di Kabupaten Bone. Saya kira demikian saja Pak Ketua terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kita sepakat setelah dua penanya ini kita *break* untuk istirahat, shalat, makan dan dilanjutkan nanti jawaban Pak Menteri ½ jam cukup? karena Pak Menteri masih ada kegiatan di kantornya. Kata beliau, kata Pak Edhy tadi ini wa.

Silakan Pak Narno, coba 2 menit mas.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Oke.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Ketua dan seluruh Pimpinan, juga Anggota Komisi IV DPR RI.

Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh pejabat dari Kementerian KKP yang hadir pada kesempatan hari ini.

Sedikit saja Pak Menteri, pertama saya mengucapkan mengapresiasi atas opini WTP untuk KKP ini juga luar biasa. Selanjutnya Pak Menteri di sini kegiatan prioritas KKP berdasarkan pagu anggaran untuk 2021. Nah di sini hanya merata pak kayaknya anggaran ini di kayak merata semua tapi mana yang menjadi prioritas utama mestinya? mestinya apakah satu, apakah dua? ini di sini tidak ada yang begitu menonjol Pak Menteri seakan-akan ini hanya menghabiskan anggaran saja. Kalau kita bicara kayak satu contoh, kayak kita bicara udang untuk *cluster*-nya, ini hanya 15, 15 cluster sebenarnya kan tinggal kita luas apakah ini menjadi target termasuk juga prioritas utama atau tidak? tentu ini katanya prioritas tapi 15 cluster dari luasan negara dan bangsanya, contohnya 1 saja pak? terus prioritas lagi, kalau kita bicara bantuan pakan ikan dan lain-lain, kenapa tidak dibantu untuk mesin ikannya? bagaimana sih pak bikin mesin ikannya itu? pakan ikan itu? pakan ikan itu rata-rata akan menempati biaya yang paling tinggi dari para petani sendiri. Nah selama ini mereka beli dan beli harganya pun tidak pernah terkontrol naik, naik, naik, naik, naik, dan naik dan mereka merasa sulit bagaimana memberikan pembelajaran mereka alat dan juga pembekalan pelatihan untuk bisa bikin pakan ikan? katanya kan pakan ikan yang penting mereka, yang pentingkan bisa ngambang pak tapi nyatanya kan nggak bisa ngapung kalau bikin sendiri. Lah masa kita nggak bisa, perusahaan swasta saja bisa, masak negara nggak bisa, nah itu kita harus bisa melakukan tentunya Pak Menteri.

Terus selanjutnya terkait dengan nelayan-nelayan kita Pak Menteri. Nelayan ikan inikan pelabuhannya hanya sedapatnya Pak Menteri. Mungkin di situ ada pantainya untuk wisata yang mereka untuk sandar, untuk berjejer-jejer. Nah apakah tidak ada tentunya prioritas ke sana Pak Menteri ini dengan ada DAK dan lain-lainnya dan disini di DAK ini juga tidak ada, apakah tidak perlu? saya harapkan ada pembangunan untuk pelabuhan-pelabuhan sandar ikan khususnya Pak Menteri? apakah per 100 kilo? apakah per 150 kilo? apa per 50 kilo? karena dengan luasan pantai di negara dan bangsa kita ini jadi biar mereka lebih tertata Pak Menteri nelayan-nelayan kita ini bukan kapalnya sandar di mana saja, sedapat mereka jadi kelihatan agak kumuh mungkin Pak Menteri bisa melihat kayak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Izin Pak Kapoksi.

Kalau bisa fokus ke masalah anggaran. Oh iya bapak tadi bicara masalah pelabuhan ikan sampai 100 tahun lagi pun tidak mungkin ada bisa terwujud.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Oh gitu.

KETUA RAPAT:

Kalau selama anggarannya tidak cukup.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Terima kasih.

Terkait dengan iya itu salah satunya pak, saya pengen bahwa ini adalah prioritas utama yang mana yang memang mau ditonjolkan Pak Menteri untuk keunggulan khususnya di KKP itu sendiri? nah terkait anggaran, mungkin itu saja Pak Ketua saya tidak terlalu detail untuk ABC jumlah besaran anggaran cuman saya mengharapkan prioritas yang jelas dan mengarah bukan sekedar anggaran yang ada sedikit tapi memang prioritasnya jelas bukan hanya menyebar seakan-akan hanya untuk dihabiskan saja di Kementerian ini. Mungkin itu Pimpinan, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Merdeka!

Ibu Alien Mus, 2 menit. Maluku Utara mau dibuat apa ini? pasar ikan yang modern atau enggak usah Sabang-Merauke dulu? 2 Menit cukup Maluku Utara.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan juga Komisi IV DPR RI,
Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya.

To the point karena 2 menit saya tidak mau berpanjang lebar karena memang ini kita fokuskan di anggaran 2021, saya masih melihat fokus untuk penganggaran di tahun 2021 ini belum ada domain atau pembagian wilayah-wilayah yang strategis dengan zona-zona wilayah perikanan.

Mohon maaf Pak Menteri sesuai dengan rapat kita sebelum-sebelumnya kita memiliki daerah-daerah yang betul-betul memiliki potensi hasil nelayan yang begitu besar, yang difokuskan kepada kelautan. Ini saya masih melihat beberapa provinsi penganggaran belum-belum sangat kecil dengan anggaran juga yang kita lihat juga sangat kecil untuk di KKP, tapi kita melihat bahwa ada di beberapa daerah misalkan tadi sudah disebutkan oleh Pak Fransiskus

Leman dan juga Pak Johan wilayah NTT, NTB dan juga Papua, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, beserta juga dengan Sulawesi, Sulawesi keseluruhan beserta juga dengan Natuna atau Kepri harus ada fokus penganggaran pak di wilayah-wilayah tersebut dikarenakan bukan hanya karena di situ tempat perikanan tapi kita juga harus memperhatikan *cool storage*, terus sudah kalau memang kita mempersiapkan cool storage yang berarti di sana juga harus kita persiapkan daya listriknya, misalkan seperti itu dan juga daerah-daerah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah negara luar, yang juga merupakan tempat-tempat *illegal fishing*, mohon itu difokuskan.

Saya juga tidak mau mengungkit apa yang sudah ditanyakan oleh Anggota-anggota sebelumnya tapi saya berharap bahwa tahun 2021 ini KKP harus betul-betul fokus karena memang selain dengan pertanian kelautan juga adalah andalan bagi bangsa dan negara kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena Pak Hasan Aminuddin matanya sangat begitu berarti buat saya sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa dan berkata lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Menteri. Pak Menteri tolong gemar ikan itu kalau bisa dikasih ke Anggota DPR itu keseluruhan, jangan hanya beberapa orang saja. Ini saya sampaikan karena ada beberapa Anggota DPR yang setiap kali turun masa reses melakukan kegiatan gemar ikan tapi di daerah masing-masing kita tidak diberikan gitu.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Coba tolong-tolong disebutkan siapa anggotanya yang tidak dapat?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Saya tidak dapat pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Sama sekali?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Sama sekali.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tolong menjadi perhatian Pak Menteri.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Jadi itu saja Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Cukup?

Iya kalau ga dapat diperiode ini nanti didouble sudah gitu saja.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Cukup?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Banyak-banyak Anggota juga yang masih belum dapat, cuman ga berani ngomong saja ini. Itu saja, saya mengundang Bapak Menteri dan Pimpinan Komisi IV untuk berkunjung ke Maluku Utara, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu Bapak, Ibu semua untuk turun ke Maluku Utara.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Demikian pertanyaan, tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV. Selanjutnya kita *break* dulu, kurang lebih 30 menit ISHOMA. Mungkin kita kembali keruangan ini pada pukul 13.40 WIB. Rapat Kerja saya skors.

(RAPAT DISKORS)

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

(RAPAT DIBUKA KEMBALI)

Saya akan memberikan kesempatan kasihan beliau Pak Menteri.

2 menit Mas Bambang kami persilakan.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota dan,
Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Saya mengingatkan kembali kepada Pak Menteri bahwa usulan perbaikan pabrik tepung tahun 2020 kemarin, pemotongan anggaran sehingga belum masuk tahun ini. Oleh karena itu kami minta supaya 2021 ini bisa menjadi prioritas Karena ini sangat kami harapkan dan kami tunggu karena kaitannya dengan kehidupan para nelayan dan pembudidaya ikan.

Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan bahwa peralatan nelayan baik kapal maupun alat tangkap tetap kami minta supaya itu menjadi perhatian karena selama ini tidak dapat dioperasionalkan oleh para nelayan sehingga kami berharap kapal dibuat dari kayu dan di daerah ini Kalimantan Tengah khususnya banyak yang bisa membuat kapal dan bahannya juga sangat bagus karena pakai kayu ulin dan perlu kami sampaikan ketika kementerian membuat program bantuan para nelayan kami siap untuk mengawal karena selama ini bantuan kapal ini para nelayan ini nebus, dia harus bayar. Saya juga sangat terkejut kemarin ini keluar dari para nelayan dan yang dapat hanya kelompok itu-itulah saja sehingga ini nelayan yang memang kehidupannya masih miskin tidak mendapatkan bagian. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dari Pak Menteri, kami siap mengawal sampai ke sasaran. Saya kira itu yang penting.

Kemudian terkait dengan Sumber Daya, saya juga perlu mendapat perhatian termasuk juga nelayan sungai di Kalimantan Tengah ini sangat besar nelayan sungai dan perlu juga peralatan perahu dan tidak terlalu besar perahunya kecil-kecil. Nanti kami akan sampaikan permohonan kami dari nelayan baik dari nelayan laut maupun nelayan sungai agar menjadi perhatian dari Pak Menteri Perikanan.

KETUA RAPAT:

Sudah Pak Bambang? *Sampun?*

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Sampun

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan saya Pimpinan, Sutrisno.

KETUA RAPAT:

2 menit Mbah Tris ngih?iya silakan Mbah Tris karena jam 2, 14.30 harus berakhir ini. Silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pak Menteri dan jajarannya.

Saya akan menyikapi RAPBN 2021 tentunya atas dasar realisasi 2020. Dari yang disampaikan Pak Menteri tadi neraca perdagangan ekspor impor perikanan itu tumbuh 8,3% tapi menurut data statistik bahwa pertumbuhan PDB triwulan kedua atau semester pertama *zero on zero* itu minus 0,63 artinya pertumbuhan ekonomi itu di dalam negeri hasil produksi di dalam negeri itu tidak tumbuh atau pasarnya lemah atau produsen kurang. Pertanyaan saya mengapa sampai berapa jauh sentuhan program tahun 2020 dalam

mengungkit perekonomian yang bersumber dari badan usaha perikanan? yang kedua Pak Menteri saya mencoba mencermati dari rencana bapak tahun 2021.

Dalam rencana anggaran tahun 2021, saya mencermati anggaran dukungan manajemen itu Rp3,51 triliun atau 52% lebih sedangkan anggaran untuk pengelolaan perikanan itu hanya Rp2,26 triliun atau 33,9%, nampaknya salah satu sebab kenapa tidak tumbuhnya ekonomi didalam negeri yang itu bukan sektor perikanan? karena tidak seimbang komposisi anggaran terlalu besar untuk dukungan manajemen sedangkan untuk menumbuhkan ekonomi rakyat itu masih dibawah hanya 33,9%.

Yang ketiga dari rencana anggaran menurut sumber pembiayaannya ternyata Dirjen Penguatan Daya Saing itu paling kecil dari semua dirjen yang ada sedangkan di saat sekarang pada posisi kita menangani Covid tentunya harus diimbangi dengan bagaimana menumbuhkan ekonomi? oleh karena itu tahun 2021 dalam rangka mencegah terjadinya resesi agar anggarannya ini untuk Dirjen atau Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing juga perlu ditingkatkan dan tentunya juga keseimbangan antara belanja tidak langsung dan belanja publik pun juga perlu dipertimbangkan.

Yang ketiga Pak Menteri bahwa wilayah NKRI ini mayoritas adalah wilayah laut 70% lebih, tentunya isinya anugerah dari Allah tidak perlu membuat bagaimana kita memanfaatkan hasil laut untuk kesejahteraan rakyat tentunya yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana pengawasan agar hasil laut yang ada tidak diambil oleh rakyat diluar NKRI.

Yang terakhir Pak Menteri hasil kunjungan reses saya bahwa ada pesanan dari rakyat, Nelayan Blanakan di Subang itu mohon untuk diberikan bantuan *excavator amphib*. Mereka memerlukan untuk membongkar manakala terjadi pendangkalan aliran sungai menuju ke tempat penambatan pelabuhan ikan. Mereka berjanji bisa bergotong-royong tidak perlu anggaran dari Pemerintah manakala untuk melakukan reklamasinya, saya kira ini patut untuk dipertimbangkan. Yang kedua permintaan mereka adalah *cool storage* antara 50 ton sampai dengan 100 ton transaksi di sana tiap hari minimal satu miliar. Oleh karena itu juga sangat diperlukan untuk tumbuhnya ekonomi di tahun 2021 ini.

Dari Majalengka Pak Menteri bahwa Majalengka bukan daerah laut tapi tiap hari pembeli ikan dari rongsongan Indramayu 6 sampai 7 ton karena di Majalengka ada pengrajin ikan pindang dan juga lainnya yang kemarin di gunakan untuk gemar makan ikan, 200 pengrajin itu mohon kendaraan freezer agar supaya kualitas ikannya supaya bisa yang baik. Saya kira itu dari saya Pak Menteri terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Trisno.

Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati.

Saya ada beberapa hal pak karena saya belum bicara ini, yang pertama.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tidak daftarnya tapi Pak Hermanto ini? belum daftar Pak Hermanto? saya beri kesempatan asal *to the point* bisa pak? kami persilahkan Pak Hermanto, kalau nggak bisa padam nanti.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Menteri yang saya hormati.

Pertama saya menyampaikan apresiasi atas tercapainya WTP di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian mohon terkait dengan adanya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap ABK WNI di kapal nelayan asing, ini mohon Pak Menteri supaya melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap kapal asing yang menggunakan tenaga ABK. Saya minta supaya ini diseriusi karena belakangan ini terjadi kembali. Kemudian saya mencermati bahwa terkait dengan soal gemar ikan ini, ini jangan hanya sekali kampanye makan ikan saja karena kalau kita cuman hanya sekali untuk gemar ikan dan saya pikir target-target untuk *stunting* dan kecerdasan masyarakat itu tidak tercapai, saya minta ini supaya dilakukan secara reguler.

Kemudian terkait dengan anggaran, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bappenas, potensi budi daya ikan itu bisa mencapai Rp460 triliun per tahun tapi saya melihat di sini anggaran kementerian itu hanya Rp6,6 triliun untuk tahun 2021. Saya melihat ini terlalu jomplang Pak Menteri potensi yang begitu tinggi tetapi anggaran yang disediakan sangat kecil. Saya minta supaya Pak Menteri bisa menambah kembali anggarannya setidak-tidaknya sesuai dengan tahun 2014 karena potensi yang besar ini. Saya khawatir cuman hanya dinikmati oleh asing saja karena asing disini memiliki teknologi yang canggih untuk bisa menangkap ikan sementara kita hanya kalau menggunakan nelayan hanya sebatas memanfaatkan 12 mil, kapal-kapal kecil 3 mil, nah ini saya pikir sayang potensi yang begitu besar dengan anggaran yang sangat kecil.

Kemudian terhadap juga nih anggaran daya saing dirjen, ini nilai tambah daya saing ini hanya sebesar Rp289 miliar, saya pikir ini memang terlalu sangat kecil dan oleh karena itu saya minta supaya ini harus ditambah karena mengingat kita bisa meningkatkan mutu daripada produksi dan industri ikan kita dan sehingga bisa dapat meningkatkan nilai ekspor kita. Kemudian terkait dengan itu supaya ada anggaran untuk pakan mandiri bagi budidaya ikan dan juga termasuk di Mentawai ini supaya pabrik es dan *cool storage* segera diperbaiki, ini aspirasi.

Kemudian terkait dengan aspirasi berikutnya adalah bahwa beberapa waktu lalu tanggal 25 Januari, KKP melakukan pelatihan untuk keselamatan nelayan. Pada saat itu para utusan dari KKP sama dengan... mendampingi menyerahkan tetapi sampai sekarang ini belum ada realisasinya padahal ini sudah sangat mepet sekali dari segi anggaran. Kemudian juga di situ ada bantuan-bantuan yang sebenarnya harus bisa direalisasikan belum ada di kelompok nelayan yaitu ada bioflok, ada excavator, ada benih ikan dan lain sebagainya yang sudah diagendakan dan sebenarnya sudah sudah diusulkan ke kementerian sekarang ini juga belum direalisasikan. Nah itu saja Pak Menteri.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikum salam warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih Ustadz Hermanto yang telah menyampaikan aspirasi dan saran APBN 2021. Ada pendapat pak manakala ini bisa diimplementasikan untuk mencari solusi dari teman-teman tentang Bansos, ini ada fakta-fakta yang dilakukan dan ini tidak bermasalah saat pemeriksaan Bansos pak. Di Jawa Timur itu oleh Pemprov sering kadangkala, bukan kadangkala tidak melalui Pemerintah Daerah Bansos anggota DPRD-nya, langsung hanya sebatas saksi dinas itu, langsung ke Kepala Desa dan Camat, yang penting ada legalitas stempel garudanya kan pak? ini Coba lakukan kajian di dalam agar supaya mampu mengakomodir apa yang menjadi keluhan teman-teman kecuali Hasan Aminuddin tidak ada masalah kalau ada masalah kan saya berhentikan bupatinya, ini solusi Pak Inspektur. Itu sudah semenjak saya jadi bupati, teman-teman DPRD provinsi itu cukup Kepala Desa dan Camat saksi dari SPJ nya itu. Ini jadikan kajian di dalam manakala tidak bertentangan dengan, saya pikir karena ada Garuda yg cukup kan? cukup selesai di sana biar Pak Charles ini yang satu partai katanya sering keluh kesah dan Lulu ini.

Yang kedua pak, saya ingin merasionalkan pak bagaimana APBN 2021 itu langsung dirasakan oleh rakyat? apalagi getarannya peningkatan pemulihan ekonomi rakyat? 1 tahun yang berpuasa ini bagaimana bangkit rakyat? yang kedua ada hiburan rakyat yang hari ini fenomenanya sudah diluar akal kita. hari ini banyak tempat wisata di lokal itu yang banyak dikunjungi rakyat bukan ke luar provinsi. Wisata bahari Desa itu agar supaya jadi prioritas mengalihkan kejenuhan rakyat yang selama ini setahun mabit di rumahnya masing-masing.

Yang kedua pengamanan aset pak, legal aset ini agar supaya segera dicicil untuk diurus karena banyaknya aset di KKP ini yang belum ada sertifikatnya dan renovasi infrastruktur. S Saya mendampingi Pak Edhy ke Situbondo infrastrukturnya sudah tidak layak karena zaman sebelumnya ya tidak hobi merawat aset infrastruktur, mosok kantor simbolnya KKP nasional di daerah yang jelek. Inikan tidak menunjukkan sebuah kewibawaan Marwah KKP, ini agar supaya ya rehat bertahap lah, ada tahapan, apalagi rehatnya nanti dengan padat karya ya PL-PL dikit-dikitlah pak biar agar supaya ada percepatan pelaksanaan.

Yang terakhir pak, beasiswa. manakala ini akan menyekolahkan karyawan baru, mohon itu untuk ditunda agar supaya tidak mempengaruhi ya 2021 itu untuk langsung dirasakan oleh rakyat. Gemar Makan Ikan ini mayoritas aspirasi Para Anggota ini untuk ditingkatkan kualitasnya, yang kedua saran terakhir pak media, ini penting. Medianya KKP ini bagaimana ya KKP Pak Edhy ini tidak kalah dengan Menteri Bayanganlah yang setiap hari masuk Metro TV nya Pak Charles ini. Coba medianya ini agak dinaikkan lah anggaran apalagi mem-*branding* bukan mem-*branding ceremony* nya Pak Edy, mem-*branding* ikan pak. Saya awam selama ini tentang kalori ikan milik kita, seakan-akan salmon itu segala-galanya padahal protein salmon kan di bawah tongkol dan tuna, nah ini di *branding* bu. Para bapak dan ibu sekalian dimedia setiap hari bagaimana otak kita terpengaruh dengan opini yang secara rutin setiap hari di *branding* di media nasional, lokal sehingga mengalih yang biasanya kita makan di *Sushi Tei* akhirnya kita makan di restoran asli milik Indonesia yang menyediakan tongkol nggak ada di *Sushi Tei* pak yang ada kan salmon dan sebagainya padahal kalorinya di bawah itu. *Branding* seluruh hasil laut di Seluruh Republik Indonesia untuk penguatan Swasembada dan kedaulatan nelayan Republik Indonesia.

Silakan Pak Edhy waktunya ya ½ jam lah, kita tutup nanti jam 3.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak Pimpinan Sidang, Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Banyak pertanyaan ada 26 dari seluruh Anggota, saya ingin meng-*highlight* saja karena nanti kalau saya satu-satu sangat panjang sekali sesuai arahan Pimpinan. Secara prinsip garis besar berhubungan dengan program Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, program ruang laut dan penguatan daya saing serta isu-isu lainnya, ada juga tadi yang badan karantina dan badan riset dan sumber daya manusia.

Yang pertama tadi Pimpinan Ketua yang menyampaikan tentang hilangnya satu anggaran tidak ada yang hilang Pak ketua. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa program ekonomi nasional itu sama sekali sekarang ini, belum sama sekali berjalan di kami karena proses administrasinya yang cukup panjang dan sekarang sudah menuju DIPA, *insya Allah* ini langsung begitu ini selesai bisa kita eksekusi. Terus sistem pelaksanaannya juga sudah ada

penyederhanaan, ada edaran LKPP, BPK dan Inpres, Perpres dari Presiden untuk bisa penunjukan khusus dalam situasi kondisi yang luar biasa ini sehingga mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan sehingga apa yang tadi terjadi dalam kita, dalam yang kami lakukan sekarang adalah penguatan-penguatan dari sisi administrasi, kebijakan-kebijakan sehingga kegiatan di lapangan tetap berjalan Pak Ketua. Sebagai misal tentang izin kapal tangkap itu kita permudah, kita jemput bola, kita perbuat intinya adalah keselamatannya dulu, yang lain-lainnya kita kasih kelonggaran, tentunya tidak merusak tatanan dan aturan yang ada dan *Alhamdulillah* ini sudah berjalan Pak Ketua sejak bulan Desember 2019, itu sudah mulai dan inilah perputaran itu muncul di lapangan. Dalam kondisi yang luar biasa ini situasi Covid yang luar biasa tapi di sektor kita masih cukup bertumbuh dan masih terus terjadi penguatan-penguatan.

Dibudidaya juga sama Pak Ketua tentang hal-hal yang bermasalah; ada kriminalisasi anggota pembudidaya yang sampai dipanggil kepolisian dan sebagainya karena alasan tambak tidak ada izin dan sebagainya, ini sudah kami komunikasikan dengan semua kementerian. Setidaknya ada lima Kementerian yang membidangi masalah perizinan-perizinan di sektor pertambangan di daerah pesisir melalui Menkomaritim, bahkan Kepala Staf Kepresidenan kami di fasilitasi untuk ketemu semua stakeholder di dalam ini termasuk Kepolisian Republik Indonesia sehingga kesimpulannya perizinan yang 21 item itu cukup dengan satu pemberitahuan oleh BKPM. Dari BKPM nanti akan siapapun yang melakukan usaha di pesisir seperti tambak dan kegiatan-kegiatan lain yang termasuk menggunakan air permukaan air dan air dasar bawah tanah, izin terhadap AMDAL, minyak limbah buangan dari genset yang ada, izin genset dan sebagainya itu nanti sepenuhnya dalam pelaksanaannya dikawal oleh KKP sendiri bahwa akan membangun kegiatan sifatnya sudah boleh langsung cukup satu izin dan dari BKPM berjanji tidak akan lebih dari sehari, jadi diharapkan itu sudah *clear*. Nah ini kemudahan-kemudahan yang kita terus bangkitkan sentimen positif terhadap melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia.

Dari Badan Karantina kenapa ekspor kita begitu juga termasuk meningkat karena kami melakukan upaya jemput bola Pak Pimpinan. Jadi Badan Karantina ini kami minta untuk menjemput bola di mana tempat-tempat yang selama ini memproduksi atau memproduksi bahan-bahan perikanan baik itu budi daya maupun tangkap, mereka mencari mobil fasilitas. Tadi disampaikan oleh Ibu Nur'aeni tentang nelayan pembudidaya rumput laut itu memang benar pembinaan dari KKP bukan kita klaim karena mereka jalan sendiri, itu tidak karena ini semua murni perlakuan dan atas binaan melalui kelompoknya yang selalu berkomunikasi dengan KKP. Memang kita rasakan belum begitu maksimal dan belum ada bantuan yang banyak yang kita berikan di tahun 2020 baik itu tangkap budidaya maupun yang lain-lain karena kita waktu pemotongan Covid cukup berimbas banyak. Nah kami fokus di sektor kebijakan saja dulu dan kita juga melakukan bantuan menggunakan kemampuan keuangan kita lewat BLU Pak Ketua. Pada saat itu BLU kita masih 1,2 sekarang *Alhamdulillah* sudah makin terserap, sudah sekarang tinggal sisa mendekati 900 lebih kurang dari 900 miliar Pak Ketua, ini terus kita lakukan. Makannya berkali-kali kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota dalam

setiap kesempatan rapat selain APBN, selain bantuan APBN yang kita bisa berikan ke masyarakat, kita bisa memberikan kemudahan pinjaman modal kegiatan usaha melalui Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum ini kita punya kredit LPMUKP yang sebenarnya ini sudah cukup lama tapi tidak pernah dioptimalisasikan, bunganya hanya 3% dan tanpa agunan. Agunan sendiri adalah kegiatan yang itu sendiri baik itu ditangkap misalnya *perlu storage*, perlu kapal penangkap, bahkan hal yang lain-lain saya pikir itu bisa digunakan Pak Ketua.

Kemudian bisa juga untuk budidaya; membangun tambak, membangun kolam, apapun bentuknya termasuk infrastruktur lainnya itu bisa dilakukan dengan pinjaman BLU ini termasuk juga membangun sentra kuliner ikan misalnya Pak Ketua mau bikin di dapil, bapak mau bikin kawasan kuliner bisa pakai uang ini bunganya 3% dan itu tidak ada semacam kalau ada yang gagal di penjara, nggak ada Pak Ketua semua konsep pembinaan. Kita akan kasih kalau kita yakin apa yang mereka lakukan itu memenuhi syarat dan benar, tidak ada jaminan bahkan tidak ada pemungutan-pemungutan untuk itu Pak Ketua. Ini salah satu sehingga apa yang kita lakukan adalah memudahkan semua-semua jenis pelayanan yang ada di sektor Kelautan dan Perikanan menjemput bola, tidak ada yang dipersulit, tidak ada yang di anak tirikan, semua yang aktif kita utamakan apalagi memang ini sudah menjadi perintah Presiden kepada kami. Kami menjalankan visi misinya beliau membangun komunikasi kepada masyarakat nelayan dan ini kita lakukan, kita awali dengan Kepala-kepala Dinasnya itu sendiri provinsi maupun kabupaten kota.

Tadi Pak Ketua menyampaikan kesulitan komunikasi biarlah nanti urusan kami nanti tinggal kami komunikasikan tapi itu perlu Pak Ketua untuk diketahui karena supaya kita melihat hubungan antara pusat sampai daerah ini lingkupnya jelas tapi kalau memang ternyata ada yang sulit, nanti mohon biar kami fasilitasi supaya pengawasan dan tanggung jawab. Kami tidak bisa mengawasi langsung dari pusat karena itulah peran Pemerintah Daerah untuk saling menguatkan. Yang jelas kalau ada Anggota Komisi IV DPR RI yang sampai di diskriminasi di daerah, itu menjadi kewajiban kami untuk terus memberikan intervensi, tidak ada masalah kalau itu tolong kasus perkasus karena selama ini masih banyak juga yang tidak bermasalah, ada masalah pasti ini mohon nanti disampaikan kepada kami.

Kemudian yang lain Pak Ketua tentang program tadi yang hilang, tentang apapun nanti, tentang program ini kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV mana ada usulan tambahan-tambahan sebelum nanti di simpulkan di Paripurna, kami akan ikut saja selama kami saya sangat yakin dari dulu Komisi IV DPR RI sangat fokus dalam program kerakyatan dan untuk kepentingan masyarakat nelayan. Bahwa hari ini belum ada anggaran yang dirasakan masuk ya kami mohon maaf tapi bukan karena kami tidak mau karena kemampuan anggaran kami untuk kami sampaikan harus terpaksa dipotong dan kemudian pada saat pemotongan, kita akhirnya diizinkan untuk dapat ajuan tambahan Rp1,024 triliun itu pun baru dapat sekitar Rp400 miliar. Ini yang kita nanti akan optimalkan untuk bisa kita kirim segera di tahun 2020 ini ke daerah masing-masing, apalagi dengan penyederhanaan

pelaksanaan tender yang bisa penunjukkan langsung, ini juga akan kita lebih efisien kan.

Kemudian tentang ABK kapal asing, ABK Indonesia yang ada di kapal asing sudah menjadi keputusan rapat koordinasi dengan Menkomaritim dan investasi, kita minta untuk dimoratorium dulu untuk hal yang baru selama enam bulan ke depan biar kami pelajari sementara nanti kalau yang sudah ada selama ini tidak ada masalah, kami akan tetap berikan izin. Pak Ketua harus saya sampaikan masalah pengadaan kapal ABK asing yang ada selama ini sebagai Menteri KKP sepenuhnya belum terlibat karena melalui selama ini melalui Kementerian Tenaga Kerja, melalui Menteri Perhubungan dan melalui biro-biro yang atas izin dari Pemerintah Daerah dan ini pun nanti ini ke depan kita akan jelaskan, kita akan klarifikasi dan kita akan *clear*-kan semua. Semua kementerian sudah sepakat waktu itu kami juga sempat diundang di Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan ini dan sudah dalam rapat melalui pimpin Menko untuk juga segera kita mensiasati semoga kedepannya tidak ada lagi ABK-ABK kita. Mereka hanya bisa diizinkan untuk menangkap ikan, kerja di Kapal asing di luar negeri menangkap ikan dipastikan sertifikasinya jelas Pak Ketua. Nanti Pak Dirjen Tangkap yang kami minta untuk terus mensiasati, selama ini sudah terjadi komunikasi terus dengan masing-masing *stakeholder*.

Kemudian kami juga ingin menyampaikan tentang beasiswa-beasiswa ini kami rasa tetap perlu Pak Ketua karena ini bagian daripada untuk remunerasi bagi anak-anak kita yang punya kemampuan yang perlu ditingkatkan. Kami khawatir kalau kita hentikan saat ini, khawatirnya nanti terjadi lompatan kosong Pak Ketua tapi kami tahu keinginan Pak Ketua untuk penyerapan lapangan kami terus akan berjuang. Tadi kami sampaikan juga ada Rp3,28 triliun yang untuk penguatan dan mudah-mudahan nanti akan disetujui. Kami terus berupaya mohon bantuan teman-teman Banggar Komisi IV DPR RI untuk terus, kalau kami dikasih uang sekarang Pak Ketua 10, 50 triliun sekalipun kami siap untuk didistribusikan dan tempatnya pasti kami jamin akan menghasilkan produktivitas yang jelas buat bukan hanya padat karya apa yang di berikan ke kami itu akan menghasilkan lapangan pekerjaan yang untuk-untuk seterusnya Pak Ketua. Jadi bukan hari ini, terus hari ini habis, tidak sebagai misal tambak udang kemudian keramba-keramba jaring apung untuk pengembangan lobster kemudian kegiatan-kegiatan lainnya termasuk tadi Pak Ketua untuk penguatan fasilitas pelabuhan pelabuhan kita yang selama ini sudah 5 tahun tidak ada perbaikan-perbaikan karena dulu semangatnya diserahkan ke Kementerian PU tapi saya koordinasi dengan Menteri PU, Menteri PU sendiri belum pernah ada semacam rekomendasi dari kita, permintaan dari KKP ada pelabuhan-pelabuhan yang harus dirapikan karena mereka juga butuh acuan sebagai dasar untuk mereka kerjasama. Secara prinsip Pak Ketua, Menteri PU, Kementerian-kementerian yang lain kalau komunikasi dengan kami, kami komunikasi dengan mereka-mereka itu tidak ada masalah Pak Ketua.

Jadi ini hanya masalah bagaimana kita membongkar ego pribadi kami masing-masing untuk perbaikan. Secara prinsip Pak Ketua walau anggaran

kami juga nggak terlalu besar, kami masih sangat yakin masih bisa terus memproduksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.

Selanjutnya Pak Ketua tentang lobster, kami juga harus meluruskan memang benar kalau kita pakai aturan yang lama pajak lobster itu Rp250 untuk 1000 benih lobster yang kita ekspor, itu yang saya tidak mau Pak Ketua. Yang dulu bu makanya saya waktu itu usulkan Rp5.000 per ekor = Rp5.000 harga beli ke nelayan penangkap. Harga beli kepenangkap sudah nggak ada masalah, sudah clear bahkan harganya di atas itu sampai sekarang. Yang Rp5.000 terhadap pajak eksportnya ini masih terdapat protes dari beberapa pelaku kegiatan usaha karena memang harganya bisa fluktuasi, kalau harganya Rp35.000, 20.000 mereka masih oke. Harga sekarang masih di bawah Rp20.000 makanya mereka minta harganya disesuaikan dengan pertumbuhan harga di tempat negara pembeli, makanya kami berlakukan pajak progresif.

Betul bahwa peraturan PNPB Kementerian Surat Edaran Menteri Keuangan belum terbit, untuk itu makanya kami menggunakan fasilitas bank garansi Pak Ketua. Per hari ini 7,8 juta yang sudah diekspor, sudah terkumpul uang 16 miliar untuk bank garansi dengan potensi 13 miliar itu untuk pajaknya. Jadi bervariasi ada yang Rp1.000, ada yang 1500 bahkan Rp2.000 tapi sekali lagi Pak Ketua apa yang kami lakukan ini adalah sementara, kami hanya ingin fokus untuk budidayanya. Budidaya ini inti dari izin yang kita berikan, jadi perusahaan-perusahaan yang mengekspor itu kalau dia tidak ada budidaya, tidak kami kasih izin. Mungkin ada yang mencuri- curi colok iya silakan saja mereka main kucing-kucingan tapi saya yakin cepat atau lambat akan ketahuan tapi yang jelas dari semangat pemberian izin ini Pak Ketua, kalau bapak rasakan di daerah-daerah Selatan Jawa itu ekonomi sudah mulai tumbuh. Mereka yang tadinya nganggur, sekarang ada kegiatan bahkan yang mereka tadinya di rumahkan, yang dulu enggak pernah ngambil lobster, ikut ngambil lobster Pak Ketua.

Saya dapat laporan dari Bupati Trenggalek, 1 Kecamatan sudah ada perputaran uang sehari Rp15 miliar artinya apa? ekonomi mulai gerak Pak Ketua. Ini saya pikir ada langkah positif bahwa ada kekurangan, mungkin ada kucing-kucingan, masih ada menyelundup ini yang menjadi PR kami yang harus kami selesaikan. Yang jelas kami ingin membuat perbedaan yang sangat kecil bahwa menyelundup dengan tanpa menyelundup itu beda untungnya kecil sehingga mereka semakin memilih untuk melakukan secara legal Pak Ketua sehingga kami sangat yakin tentang lobster ini bapak bahwa kami melihat ini adalah peluang untuk kegiatan kita. Sekali lagi investasi terbesar kita adalah untuk budidaya bukan untuk melakukan hanya sekedar ekspor, karena kalau kita tidak ekspor, benihnya juga akan mubazir, mati juga. Waktu-waktu lobster ini dipungut pun tidak ada sepanjang tahun, ada waktu tertentu Pak Ketua.

Kemudian tadi ada pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan nilai tukar nelayan? nilai tukar nelayan sekali lagi Pak Ketua, kita belum memberikan intervensi dengan anggaran yang maksimal. Sekarang alhamdulillah kita pun

turunnya tidak begitu ekstrem, turunnya sangat kecil. Makanya kita sekarang melakukan diversifikasi di tingkat nelayan, tidak ada lagi dikotomi antara nelayan budidaya maupun nelayan tangkap. Jadi karena nelayan budidaya dengan nelayan tangkap kenapa nggak bisa sekalian sama-sama? sebagai misal rata-rata nelayan ini tinggal nelayan tangkap kan tinggal di pesisir. Kenapa nggak kita nanti dengan kemampuan yang kita miliki, kita bikin bantuan untuk membuat tambak mereka, mengelola tambak mereka sehingga pada saat bulan-bulan tidak melaut mereka bisa fokus juga untuk melakukan budidaya.

Tidak hanya itu Pak Ketua dengan cara-cara lain; pertimbangan-pertimbangan budi daya kepiting sendiri bisa dilakukan dengan rumah apartemen mini kepiting, setiap rumah bisa kita lakukan. Memang sekali ini pun akan kita lakukan semua, seandainya uangnya ada. Kami kemampuan keuangan kami yang terbatas, kami akan optimalkan secara prinsip mana yang lebih bisa segera dilaksanakan karena perintah Bapak Presiden jelas bagaimana secara fokus ke satu kegiatan. Tadi ditanyakan prinsipnya apa? kami mau bangun budi daya, iya fokus di udang vaname dulu, tidak usah banyak-banyak. Sambil berjalan tangkap, iya tangkap tapi tangkap dianggap sudah lebih diperhatikan walaupun masih banyak kekurangan dengan anggaran yang ada sekarang kita akan melakukan optimalisasi secara maksimal kepada pemenuhan kebutuhan yang bisa kita segera lakukan Pak Ketua.

Tentang hal yang lain, saya pikir nanti akan kami tambahkan dan akan kami jawab secara tertulis. Oh iya tadi ada pertanyaan tentang dukungan manajemen yang tinggi Pak Ketua memang ada kebijakan baru dari Kementerian Keuangan terhadap dukungan manajemen yang naik Rp404 miliar, karena itu ditarik dari anggaran pendidikan yang dibiayakan melalui Kesekjenan tadinya melalui BRSDM. Sebagai prinsip gak ada peningkatan dukungan manajemen, manajemennya juga masih sama. Untuk gaji sekitar Rp2,2 triliun sisanya itu dukungan manajemen dan lain-lain Pak Ketua. Sementara kalau kita lihat tadi di peta, peningkatan yang tertinggi itu kan di budi daya sebenarnya Pak Ketua, budi daya dan tangkap memang sedikit.

Terus masalah industrialisasi secara prinsip proses kegiatan industrialisasi itu menjadi domain Kementerian Perindustrian. Kami sifatnya masih belum memberikan stimulus supaya industri-industri ini nanti bisa mandiri sendiri. Jadi apa yang masih apa yang bisa kita intervensi yaitu industri-industri yang sifatnya masih UKM. Secara prinsip Pak Ketua komunikasinya terus, contoh sebagai misal tambak udang. Tambak udang kita kan fokus di clusterisasi, untuk membangun, menyentuh masyarakat sekitar, sebagai tempat ajang mereka melakukan pelajaran dan pelatihan terhadap mengelola tambak. Sementara tambak udang yang lainnya itu sudah dikelola oleh pengusaha-pengusaha swasta yang orang asli di Indonesia yang selama ini juga sudah melakukan intervensi dan mereka merasa dengan kemudahan-kemudahan izin yang diberikan, mereka semakin bergairah. Di samping itu Pak Ketua dulu bank tidak bisa, tidak mau memberikan izin tambak, mereka hanya

mau memberikan izin tambak, memberikan pinjaman ketambak kalau ada agunan dari aset pribadi.

Nah sekarang dengan tambak itu mereka sebagian bank terutama ini sudah klaim, dia siap untuk memberikan kredit untuk komersial dengan agunan tambak itu sendiri, ini berarti kan ada kemajuan Pak Ketua. Sebagai bukti mohon maaf Pak Ketua harga udang sekarang dalam kondisi pandemi itu sudah meningkat harganya lebih dari 15.000 dari kondisi di normal sebelum Covid Pak Ketua karena permintaan di dunia sangat tinggi. Posisi Indonesia sekarang belum ada 1 juta ton saja, kebutuhan dunia 13 juta ton sampai 15 juta ton dan saya belum bicara kebutuhan udang dalam negeri sendiri itu yang belum kita eksplorasi lebih luas lagi. Saya pikir ini peluang besar selain lobster dan lain-lain, kita masih punya banyak komoditas lainnya diantaranya adalah kakap putih, bawal bintang, ada satu lagi jenis ikan yang ke depannya ini akan menjadi dorongan untuk kita semakin tingkatkan yaitu Ikan Cobia Pak Ketua. Ikan Cobia ini adalah gabus laut yang ikan dari laut, tingkat pertumbuhan Ikan Cobia ini 1 tahun bisa mencapai 6 kilo Pak Ketua berbeda dengan ikan-ikan mana saja yang ada di Indonesia yang maksimal pertumbuhannya 1 ton hanya 2 kilo perekor 1 tahun. Jadi dengan Cobia kita akan cepat meningkatkan produktivitas ikan nasional kita, kualitas ikannya juga sangat bagus Pak Ketua. Ini Pak Ketua saran yang kami sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya berharap Pak Ketua, apa yang saya sampaikan ini saya juga tidak mau seolah-olah hanya ngomong di depan.

Kemudian saya mohon semua ini ada di depan dari sekjen, dirjen dan semua yang ada di depan ini Pak Ketua udah komit bahwa kita harus terbuka, bagaimanapun juga Komisi IV bukan hanya sebagai Komisi IV, Bapak Ibu sekalian dalam mewakili institusi, mewakili masyarakat pemilih dapil dan saya pikir ini satu langkah yang kami lakukan sudah selesai karena Bapak, Ibu sekalian merepresentasikan semua yang akan kami kelola dan saya sangat berharap apa yang menjadi kebutuhan Bapak, Ibu di lapangan menjadi kebutuhan kami juga di lapangan karena aktifnya Bapak Ibu di lapangan, teriaknya Bapak Ibu kepada kami juga membangkitkan semangat kami untuk terus membangun sektor kelautan dan perikanan. Terima kasih Pak Ketua.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Pak Ketua satu yang belum dijawab tentang bank pertanian pak, embrionya bank pertanian.

KETUA RAPAT:

Iya sebentar dulu bu.

Kesini dulu biar minum dulu Pak Menteri. Ada satu hal yang belum dijawab dan saya ingin ada penegasan tertulis Pak Menteri tentang aspirasi

dialog di Situbondo itu menarik agar supaya keluh kesah itu pengusaha itu selesai apalagi ada Pak Sekjen ini yang rumah lamanya dianggap sering mengganggu itu tentang perizinan. Ini penting, KKP sudah peduli ingin memangkas semua aturan dan ada bupati garap dulu ijinnya sambil berjalan. Ini sering diganggu pak, lebih galak polisinya daripada Satpol. Izin mestinya kewenangan Satpol PP, kalau saya belajar administrasi negara pak bukan kewenangan polisi malah mem-*police line* sehingga terganggu pengusaha apalagi undang vaname hari ini, undang windu sedang bagus-bagusnya di tengah krisis ekonomi oleh Indonesia ini, sekarang pengusaha sudah bangkit. Coba ada penegasan Surat Edaran tertulis kepada Bupati, Kapolres, Kajari, Forkopimda ini bentuk komitmen konkrit dari Pak Menteri ini.

Silakan di buat oret-oretan ya Pak Ambar ya kalau saya dulu bupati nya saya suruh lawan pak, iya saya lawan kalau orang luar di luar Satpol PP itu mengganggu atau mencari-cari persoalan di perizinan. Perizinan sepengetahuan saya bukan kewenangan polisi tapi kewenangan Satpol PP. Saya minta *statement* Pak Menteri ini untuk menindaklanjuti agar dapat surat tertulis yang ditandatangani oleh Pak Menteri, itu sebuah hadiah bagi pengusaha yang sedang bangkit dan perlu saya sampaikan banyak Orang-orang Indonesia yang dahulu di Amerika karena di Amerika hari ini krisis itu pulang ke Indonesia, ingin membangun Kabupaten kotanya dengan menghidupkan kembali tambak.

Silakan pak *statement* nya tentang izin dan Bu Endang yang belum dijawab tadi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Saya tadi lupa menyampaikan, apa yang bapak sampaikan tadi tidak perlu kami yang bersurat. Jadi Kapolri sudah menerbitkan edaran telegram kepada seluruh Kapolda di seluruh Indonesia 1 ½ bulan yang lalu Pak Ketua. Jadi nanti kalau ada kasus yang. Jadi kemarin ada tembusan kepada kami, nanti kami juga akan perkuat dengan telegram Kapolri juga akan kami bikinkan surat ke daerah-daerah. Tidak masalah Pak Ketua secara prinsip komunikasi kami dengan penegak hukum, ini sebagai salah satu contoh. Sebelum telegram polisi pernah ada beberapa kasus yang sudah kami bantu, kami tidak ingin mengecilkan hukum tapi di sebagai misal kasus di Bengkulu yang sudah terlanjur di penjara, *Alhamdulillah* sekarang sudah bebas dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan Pak Ketua. Jadi perhatian kami dan komunikasi kami dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dan penegak hukum lainnya juga sudah berjalan. Memang mungkin ada yang belum sempurna, kalau ada hal temuan-temuan di lapangan, ada yang terintervensi atau tanpa sepengetahuan kami, ada yang mau coba-coba ya ini mohon masukan kepada kami *Insyah Allah*. Terutama yang Jawa Timur Bapak Kapolda, Bapak fadil sudah otomatis langsung ditegur dan ditindak terhadap kasus sesuai yang bapak sebut tadi pak. Mohon nanti masukan, timbal baliknya kalau ternyata belum bapak tinggal sampaikan kepada kami lagi. Terima kasih Bapak Ketua.

Ibu Endang, masalah BLU ini adalah, Iya kami siap saja kalau kami dibuat bank, bisa dijadikan embrio bank nelayan, tapi saya prinsip perannya ini adalah untuk mendahului dari peran-peran bank dengan KUR-nya karena konsep pendekatan KUR yang 6% itu masih menguasai pendekatan bank. Rakyat kita masih sangat awam terhadap proses pengikatan bank ini makanya kami melalui penyuluh-penyuluh kami yang ada tadi kalau lihat dukungan manajemen itu sebesar yang ada itu 2500 THL-TBPP masih kita pertahankan walaupun mereka masih kita pertahankan. Makanya dukungan manajemen kita cukup besar itu untuk membiayai gaji bulanan dan kegiatan mereka. Ini yang kita akan perkuat untuk memberikan penyuluhan atau pengarahan terhadap kredit-kredit yang dimiliki oleh, yang dikeluarkan oleh Pemerintah tapi belum terserap oleh nelayan.

Sebagai catatan tahun 2019 penyerapan kredit KUR ini kepada masyarakat di bawah KKP itu masyarakat nelayan masih sangat rendah 2,5 triliun saja padahal targetnya kami ingin lebih dari itu. Ini mereka bukan tidak mau menyerap karena mereka juga punya keterbatasan, tidak memahami bagaimana caranya. Makanya kami intervensi melalui BLU ini, begitu BLU nanti baru dia sudah mampu dan mereka ingin melakukan pengembangan kredit, kami akan arahkan ke KUR, ini prinsipnya. Saya pikir ini Bu Endang, terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sedikit Pimpinan.

Pak Menteri saya kira.

KETUA RAPAT:

Ada yang belum dijawab pak?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ada minta nomor HP.

KETUA RAPAT:

Oh nomor HP.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

BLU ini memang penting, saya support Pak Menteri hanya di Sulawesi Barat tidak jelas di mana tempatnya untuk mengajukan permohonan, lembaga mana. Saya minta nomor hp-nya supaya saya bisa menghubungi, saya salurkan banyak di. Yang kedua Pak Menteri ada namanya *Lola, Niloticus* bahasa latinnya, ini polisi di Mamuju. Memang tahun 99 *Niloticus linn* ini dilarang tapi sudah keluar SK dari KLHK tidak masuk lagi *Niloticus linn* ini sebagai larangan tapi masih ditangkap oleh *Lola Keong* ini potensinya

sebenarnya besar. Tolonglah di koordinasi dengan Polda sehingga tidak menangkap orang-orang yang menangkap ini karena ini potensinya cukup besar, terima kasih Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Mohon izin saya jawab.

Jadi itu sekarang kami sudah berkomunikasi dengan KLHK di bawah koordinasi Kemenko maritim dan investasi komunikasi tentang ranah-ranah kelautan dan ranah-ranah KLHK. Jadi secara prinsip kami dari KKP juga sudah setuju melepaskan kawasan konservasi yang sudah terlanjur dikelola KLHK, sebaliknya KLHK akan menyerahkan semua jenis makhluk hidup dan sektor yang di bawah kelautan seperti ikan dan yang termasuk ini itu dan termasuk ikan arwana itu sudah resmi di bawah pengendalian Kementerian KKP, nanti dibawah Direktorat Jenderal Ruang Laut. Nomor telepon mungkin biar sebut saja sekalian untuk yang lain.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

081 150 5086.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

081 150 5086.
Bacain lagi pak.

KETUA RAPAT:

Iya nanti aja bu. Digroup aja nanti, dishare digrup Komisi IV.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Izin pak saya tambahin biar sekaligus ini clear. 0811 150 5086 ini saudara Syarif Syahril Direktur BLU waktu itu di Bekasi Pak Presiden minta ini nama terlalu nama BLU-nya, beliau minta *branding*-nya "Bank Mikro Nelayan". Jadi ini kita sebut Bank Mikro Nelayan tapi intinya namanya tetap di SKnya BLU LPUMKP nanti biar apa yang bermasalah, apa yang membutuhkan silakan hubungi Pak Syarif karena mungkin bapak sibuk, tolong juga bapak bikin *hotline* siapa yang ditunjuk untuk menerima semua harapan-harapan dari seluruh *stakeholder* di sektor kehutanan perikanan tolong dijadikan sebagai catatan dalam hasil Rapat Kerja kita hari ini terima kasih pak.

Iya bu *Cherax* itu masuk di KKP karena itu *Cherax* itu udang lobster bukan dari asli kita. Itu datang dari luar dan itu semakin banyak di air tawar kita, ini juga salah satu potensi protein yang bisa kita kembangkan bu.

Ibu mau menanam.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Bukan, ada yang populasinya karena itukan... hanya dihargai 5.000 bapak tetapi ternyata di Australia itu satu itu dihargai bisa 2 juta, bahkan yang termahal itu sampai 25 juta.

KETUA RAPAT:

Konon katanya atau sudah pernah ke sana? dua juta? Konon katanya?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Oh bukan, saya pernah juga lihat waktu ke Spanyol terakhir juga disitu. Itu yang Nmix Papua pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Iya bu tolong disampaikan saja para pengumpul dan asosiasinya untuk melaporkan kepada kami sehingga kami bisa menindaklanjutinya. Terima kasih bu.

Tambahan Pak Ketua untuk menjawab tentang pengawasan kelautan, memang kami butuh, masih butuh dukungan untuk anggaran kegiatan pengawasan laut kami. Banyak hal tidak hanya di Natuna, di WWP 17 kami akan juga fokus di daerah Arafuru di Indonesia timur di 718, 715 itu daerah-daerah yang sebenarnya juga rawan untuk orang melakukan untuk pencurian. Maka itu kami ingin menguatkan sektor pengawasan udara kami melalui *drone* maupun satelit pengawas yang lebih *real time* ini sedang kami cari, nanti pada waktunya kami mohon untuk bisa Pak Ketua mengusulkan.

Pak Ichsan hanya kami klarifikasi memang benar banyak yang bilang di Medsos tentang nelayan-nelayan asing dari China yang masuk ke Natuna secara prinsip pengawasan kami terus 24 jam. Pernah beberapa kali kami ketemu tapi itupun berhasil kami halau karena itu yang masuk duluan adalah *costguard*-nya dan mereka tidak melawan, mereka geser saja. Belum sampai ketahuan di *zone* kita seperti nelayan-nelayan Vietnam ini sehingga secara prinsip walaupun ada yang mengaku ribuan Kapal China itu saya berani sampaikan diruangan terhormat ini kami sampai sekarang belum melihat. Kalau sampai ada ribuan pasti kami tangkap Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Kyai garam tadi belum disebut sama Pak Johan.

KETUA RAPAT:

Oh iya silakan.

F-PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Tadi saya angkat garam, Pak Slamet angkat garam, yang jelas sentra garam rakyat sekarang sedang menjerit. Nah Pak Menteri belum menjadi *concern*-nya, belum memberikan penjelasan juga soal ini.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Edhy.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Tadinya kami mau menjawab secara tertulis pak tapi kami juga jawabkan disini. Secara prinsip begini pak garam, saya prinsip dari awal kami juga sama dengan Teman-teman Komisi IV DPR RI tapi saya juga tidak mau berdebat terlalu panjang di publik karena di sisi lain ada yang berteriak ada garam kebutuhan industri dan garam rakyat padahal garam itu sebenarnya sama-sama asin. Dulu kita bicara industri hanya industri yang non makanan tapi sekarang termasuk industri makanan minuman. Kebutuhan garam kita 4,7 juta setahun, kemampuan produksi kita belum ada 2,5 juta ton. Ini ada gap tapi ini berlaku mutlak impor itu seolah sudah berlaku untuk 4,1 tapi saya tidak mau berdebat dulu kami waktu rapat dengan Menko Ekonomi oke kami ikut karena memang setelah kami cek masalah garam industri mereka butuh garam industri itu yang NaCl nya diatas 97.

Tugas kami sekarang Pak Ketua dan Teman-teman Anggota Komisi IV, kami ingin garam industri yang dimiliki rakyat, garam rakyat ini akan kami tingkatkan kualitas NaCl nya menjadi diatas 97 karena kami sangat yakin, saya sangat yakin apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi dengan garamnya ini mungkin itu pasti di atas 97 sama halnya yang pernah kami lihat di beberapa daerah dari kunjungan kami tentang garam. Makanya di Pak PRL program kami itu untuk penguatan stimulus garam-garam rakyat untuk menuju ke 97, disamping itu kami juga ingin menurunkan harga-harga produksi garam, harga produksi garam itu terbesar adalah ongkos angkutnya. Ongkos angkut barang ini ada di kesulitan orang membawa garam dari hasil panen, kenapa? rata-rata tidak ada jalan besar.

Nah ini yang kami minta, sedang mendata dan mungkin kalau ada masukan dari bapak ibu semua daerah-daerah garam, mungkin bupati atau yang bapak ibu kenal yang tahu. Kami mohon untuk diberitahukan, untuk kami sampaikan ke Menteri PU untuk dibangun jalan pak tapi dengan catatan tidak boleh lagi ada pembebasan lahan nya, jadi jalan yang siap di rapikan untuk diaspal untuk dibangun jalannya Menteri PU siap sehingga dengan ini diharapkan akan menurunkan ongkos angkut sebagai misal waktu dulu kami disampaikan, satu karung itu harus 12.500 padahal satu karung itu isinya cuma

50, ongkos garam harga garam sendiri cuman 500-600. Ini yang kita mau supaya margin antara biaya dengan keuntungan itu ada beda yang cukup besar. Disamping itu kami sudah cukup maju dengan geo membran yang dilakukan zaman Ibu Susi dulu tinggal kami ingin memperbanyak karena buktinya 1 hektar itu dulunya hanyalah 80 ton sekarang sudah sampai 140 ton. Jadi ada peningkatan yang signifikan lebih 50% Pak Ketua.

Jadi ini yang kita dorong dan begitu nanti waktunya kita sudah siap untuk menyampaikan ke seluruh *stakeholder* di sektor perindustrian bahwa kita punya garam yang di atas 97 NACI nya. Jadi kita sudah berani untuk silakan impor yang di luar kebutuhan yang ada di dalam negeri ini saja. Jadi sambil berjalan kami terus akan meningkatkan kualitas dan kuantitas jumlah garam Indonesia. Terima kasih Pak Slamet.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan jawabannya. Tentunya tidak akan sempurna jawaban.

Ada pengumuman? oh silakan, silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pimpinan izin Pimpinan.

Ini ada Surat Undangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kunjungan kerja dari tanggal 28 Agustus-2September di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Kalimantan Timur. Untuk itu Anggota-anggota DPR di dapil tersebut, dimohon untuk mendampingi. Pak Yohanes Fransiskus Lema, Pak Edward Tanur, Ibu Julie Sutrisno Laiskodat, dan Pak Abdullah Tuasikal dan saya sendiri dari Kalimantan Timur, itu saja Pak Ketua.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Mohon izin pak, bukan mendampingi. Kami mengundang pak, kami tidak berani, kami yang mendampingi bapak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Edhy atas undangannya. Tentunya jawaban yang belum dijawab sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Edhy akan dijawab tertulis termasuk pertanyaan dari virtual takut di intrupsi karena sudah mau selesai rapatnya. Sebelum saya bacakan kesimpulan dari meja Pimpinan mewakili teman-teman semua Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI menyampaikan selamat mengemban amanah baru promosi Ibu Artati Widiarti, doanya semoga diberikan kemampuan lahir dan batin oleh *Allah* untuk mengemban amanah. Direktorat Jendral Tangkap; Pak Muhammad Zaini, Direktur Utama Perikanan Indonesia; Pak Fattah, luar biasa menyakinkan

jangan sampai rugi karena di Komisi IV DPR RI rata-rata BUMN semua bilang rugi.

Para Bapak dan ibu sekalian.

Dari dialog, diskusi, saran dan masukan sebelum acara kita akhiri, kami bacakan rancangan kesimpulan Raker pada hari ini. Kami persilahkan Mas Budi untuk membacakan.

Silakan biar sama-sama punya tanggung jawab. Silakan Pak Budi nanti saya yang menutup kembali, silakan dibacakan.

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik terima kasih Pak Kyai Hasan.

Kesimpula/Keputusan Rapat:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tahun anggaran 2019 per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan realisasi anggaran (LRA):

1. Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa PNBPNP senilai Rp792.499.187.263,00 atau 96,26 % dari estimasi pendapatan LRA senilai Rp823.303.537.000,00.
2. Realisasi belanja negara bersih senilai Rp5.055.148.917.815,00 atau mencapai 91,73 % dari alokasi anggaran setelah revisi senilai RP 5.510.787.032.000,00

b. Neraca:

1. Nilai Asset senilai Rp26.369.688.908.766,00
2. Nilai Kewajiban senilai Rp 342.991.147.623,00
sehingga nilai ekuitas senilai Rp 26.026.697.761.143,00

c. Laporan Operasional (LO):

1. Pendapatan LO senilai Rp759.032.914.572,00
2. Beban senilai Rp5.857.773.239.975,00
Sehingga terdapat defisit Rp5.381.132.862.908,00 dari kegiatan operasional senilai Rp5.098.740.325.403,00 dan kegiatan non operasional senilai Rp282.392.537.505,00

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):

Ekuitas akhir sebesar Rp 26.026.697.761.143,00

Anggota bisa disetujui? Pak Edhy?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI mengapresiasi laporan keuangan tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 13a/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selalu memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan melakukan penyempurnaan beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut dan penguatan.

Anggota Komisi IV?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Setuju, baru pertama kali WTP pak ya? luar biasa Pak Menteri ini.

KETUA RAPAT:

Luar biasa, Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju pak, terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp.6.652.139.393.000,00 (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) TA. 2021 Kementerian Keuangan Nomor S-692/MK.02/2020 dan Kementerian PPN/Bappenas B-636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan bersama dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-

masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Anggota Komisi IV? Pemerintah? Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.286.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah)

Anggota Komisi IV? Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (Satu triliun rupiah) dengan rincian:
 - a. DAK Provinsi sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).

Komisi IV? Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menginventarisasi dan mendata seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar di Indonesia sehingga kepemilikan aset negara menjadi legal dan pengelolaannya menjadi efektif, efisien serta sarana prasarananya dapat ditingkatkan.

Anggota Komisi IV? Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju pak, terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produksi Kelautan dan Perikanan tahun 2021, sehingga pelaku usaha perikanan dapat bertahan dan mampu bangkit ekonominya akibat Pandemi Covid-19.

Komisi IV? Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Siap pak terima kasih, setuju pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meneruskan program dan kegiatan yang bersifat padat karya disetiap unit Eselon I teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti Benih Ikan, Minapadi, Bioflok, Pakan Ikan Mandiri, Gemar Ikan, Chest Freezer, Kapal Nelayan, Alat Tangkap Ikan, Bakti Nelayan, Bakti Mutu Karantina, Apartemen Ikan/Udang, Ekonomi Kreatif, Desa Wisata Bahari, Gerakan Cinta Laut (Bersih Pantai), Kelompok Penggerak Konservasi, Kelompok Masyarakat Pengawas dan kegiatan lainnya.

Rekan-rekan Komisi IV? Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju pak, terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar setiap bantuan Pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat disampaikan secara langsung tidak perlu melalui rekomendasi dari Dinas Pemerintah Daerah akan tetapi melalui Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam pedoman petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi IV? Pemerintah? Pak Menteri silakan kalau ada catatan atau masukan?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Pak gini pak, mohon izin saya harus sampaikan dulu.

Kan kami dengan provinsi dan kabupaten kota sudah komitmen untuk saling terbuka tentang semua kegiatan. Kami pada saat Rakor pertama kali di bulan Desember/November waktu dulu 2019 bahwa kami ingin memastikan bahwa semua kegiatan yang kita rancang di pusat, itu kabupaten kota maupun provinsi wajib tahu sehingga KKP kantor pusat di Jakarta ini merupakan tempat mereka untuk saling beradu argumentasi, untuk merebut semua kegiatan yang masuk ke daerah. Berarti komitmen yang mereka sampaikan itu tidak hanya sisa arah ke kami tapi kami juga berhak untuk menuntut mereka, setiap yang kita arahkan apalagi yang dikawal oleh Komisi IV DPR RI itu pasti disampaikan.

Jadi mungkin saran kami pak, ini tidak perlu disampaikan karena secara prinsip ini akan nanti memundurkan lagi komunikasi yang selama ini sudah kami bangun. Kalau nanti ada daerah-daerah yang tidak mau, saya berani taruhan pilihannya Kepala Dinas itu pasti diganti sama bupati atau tidak.

Gimana bu? Nggak, nggak, nggak nanti kami akan sampaikan bu. Kami akan punya komitmen untuk sampaikan itu. Bukan alsintan bu, kami kan itu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Sebentar Pak Menteri.

Pak Ichsan ada masukan?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Menteri yang saya hormati.

Maksudnya teman-teman begini artinya kalau memang toh ada rekomendasi dan sebagainya dari DPR RI misalnya kalau memang toh harus ada keterbukaan itu sampaikan saja pak ke dinas setempat begitu, bawah ini adalah rekomendasi dari kita.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Harus selalu begitu pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Artinya yang dikhawatirkan oleh teman-teman selama ini adalah ketika kemudian membutuhkan rekomendasi dari dinas setempat yang terkadang menyulitkan. Ini kita putar saja dari pusat dulu baru diberi tahu ke daerah. Bukan daerah kemudian memberikan rekomendasi kepada kita baru kemarin ke pusat. Jadi tidak ada persyaratan rekomendasi dari dinas, kami ke atas baru kemudian teman-teman di KKP itu memberitahukan kepada daerah bawah ini loh bantuannya begitu, jadi bukan *bottom up* Pak Menteri tapi *top down*, kira-kira begitu Pak Menteri. Mohon maaf Pak Menteri bahasanya agak keren sedikit *top down* sama *bottom up*.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Pak Ketua jadi.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Memang benar *top down*, sebenarnya tidak ada kewajiban untuk rekomendasi seperti dipertanian termasuk tidak ada kewajiban juga, kan kami sudah juga meringankan tidak ada berbadan hukum sambil berjalan artinya secara prinsip sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin hanya saja saya nggak tahu kalau Ibu Luluk iya mungkin bupatinya seperti apa sama beliau sehingga ga kasih izin saya ga tahu. Saya nggak bisa intervensi yang seperti itu.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Menteri Anggota Komisi IV DPR RI bukan Bu Luluk saja Pak Menteri tapi beliau memang khusus.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Katanya Bu Luluk saja yang ditolak pak, bapakkan enggak?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Anggota PKB pak, Fraksi PKB kan?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Baik pak kami mohon izin pak.

Kalau Bapak hilangkan tidak apa-apa sebenarnya kalau ada juga kami juga tidak ada masalah pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Intinya *Top Down* ya Pak Menteri? itu poinnya perjanjiannya begitu.

KETUA RAPAT:

Jadi, kalau boleh disetujui kita hilangkan saja, sudah ada pengertian dari Pak Menteri. Ibu Luluk kalau masih dipersulit boleh langsung lapor saja nanti bisa langsung.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Iya saya setuju kalau itu dihilangkan tapi karena kita rapat ini direkam artinya ini adalah komitmen bersama antara kita sama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kira-kira begitu ya Pak Menteri ya?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Itu komitmen kami pak untuk mengawal program bapak sampai ke tujuan Bapak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kira-kira seperti SIRI begitu ya pak ya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Kecuali kalau misalnya begini pak, kalau ada yang dituju misalnya ini pak Bapak mengusulkan A tapi ternyata A ini pernah bermasalah. Mungkin bapak belum tahu waktu itu dan kami kasih tahu, kami minta ganti tempat boleh dong pak ya? yang penting program tidak berkurang, ya itu.

KETUA RAPAT:

Pak Ichsans? mantap? baik.

Tolong dihapus Nomor 9, kita lanjut kemudian ke poin berikutnya.

Baik 9 yang baru ya? saya bacakan

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kegiatan pengerukan sedimentasi di seluruh pelabuhan perikanan di Indonesia yang terjadi pendangkalan alur kapal nelayan.

Komisi IV?

F-PKS (Dr. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Ini agak susah ini Ketua kesimpulannya ini karena Kementerian Kelautan perikanan tidak punya anggaran untuk ini nih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Tidak pak, mohon izin saya jawab sedikit pak sebelum saya. Jadi kami saya sendiri sudah memerintahkan sejak pertama jadi menteri untuk mendata semua areal atau wilayah pelabuhan yang mengalami pendangkalan. Pada saat kunjungan awal kami tahun 2019 di Sungai Liat salah satu PR dan tidak hanya itu banyak masukan-masukan dari Bapak Ibu Anggota DPR RI. Ini sekarang kami data, hasil kesimpulan ini juga tidak ada masalah, dibunyikan bagus semakin menguatkan kami tapi kami nanti izin tidak semua anggaran dari KKP akan mampu melakukan pendalaman terhadap pendangkalan ini. Kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Secara prinsip PUPR dan Perhubungan sudah siap akan lebih bagus kalau memang ada Anggaran khusus yang diberikan Banggar melalui Komisi IV DPR RI untuk khusus melakukan pengerukan sendiri, secara prinsip kami tidak ada masalah.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Luluk ada masukan?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.) :

Masukan kalau misalkan ditambahkan karena ini hanya soal pelabuhan, tetapi ada persoalan diwaduk pak, itukan juga perikanan. Kayak di Wonogiri itu sedimentasi sudah 8 juta ton kemudian di Kedung Ombo juga begitu, jadi mungkin sebaiknya bisa ditambahkan? Atau?

KETUA RAPAT:

Bu Luluk itu betul tapi kalau udah masalah waduk dan sebagainya, kan ini benar-benar dah ranah PUPR kalau tidak salah. Maksud saya daripada nanti harapan-harapan ini nanti susah, mendingan kita kalau mau di sini saja dulu, syukur-syukur nanti ada lagi Bu Luluk.

Cocok? jadi sebagai catatan untuk penguatan saja tidak papa-papa. Kita masukkan, Pak Menteri boleh setuju?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju pak.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Budi.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Fransiskus Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.) :

Iya, saya menyimak apa yang dijelaskan Pak Menteri tidak bisa semua tetapi sesuai anggaran. Nah kalau kita lihat redaksionalnya itu, menurut saya harus ada perubahan. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kegiatan pengerukan sedimentasi di pelabuhan perikanan, seluruhnya tuh dihapus di Indonesia yang terjadi pendangkalan alur kapal nelayan sesuai dengan anggaran, kemampuan anggaran begitu. Untuk mengakomodasi tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri karena tidak semua karena anggarannya terbatas.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Saya pikir tidak perlu pakai sesuai pak, tetap menjadi kewajiban kami sehingga kami akan terus berupaya karena alat yang kami lakukan bisa aja dari sini, bisa jadi numpang di Kementerian, mungkin juga Kementerian Desa termasuk.

KETUA RAPAT:

Yang dihapus seluruh pelabuhannya ya? seluruhnya saja pak tolong, dipelabuhan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Siap Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya izin buat catatan saja, bahwa untuk Pak Menteri di poin 9 ini selama ini kan sebenarnya alokasi anggaran untuk pelabuhan perikanan ini sejak lima tahun terakhir ini kan dialokasikan ke kementerian lain. Menurut saya ini kan menjadi sebuah motivasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan

untuk mengambil alih lagi infrastruktur pelabuhan perikanan ini ke KKP tidak ke kementerian yang lain karena kewenangan itu saya melihat begini kalau kita evaluasi ya bahwa pelabuhan perikanan sering kali itu tidak menjadi prioritas pada saat kemudian dibangun infrastrukturnya atau perbaikan infrastrukturnya, lebih banyak ke arah fisik, jalan dan sebagainya.

Nah ini kan motivasi sebenarnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengambil alih kembali termasuk nanti di point 10 sebenarnya.

Jadi bahwa inikan sebenarnya kewenangan kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau Pak Menteri kemudian berhubungan dengan Kementerian yang lain *it's oke* tapi lebih enak ini bukan ego sektoral Pak Menteri tetapi prioritas. Saya khawatir prioritas anggaran untuk rehabilitasi pelabuhan itu perikanan khususnya pelabuhan perikanan itu dinomor 2 kan di Kementerian yang lain tapi kalau di kementerian teknis seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menjadi prioritas utama karena kita lihat 5 tahun ini, kita lihat infrastruktur pelabuhan kita juga sudah banyak yang rusak Pak. Nah maksud saya point 9 ini menjadi satu tekanan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mendorong kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi prioritas utama pelabuhan perikanan, itu pak maksud saya.

Paham ya Pak Menteri ya? mohon maaf Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Sudah pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tapi nanti dialokasikan ya maksud saya jangan hanya di catatan begitu pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ichsan.

Jadi untuk point 9 bisa kita terima?

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju pak.

KETUA RAPAT:

Semua setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memasukkan menu dalam kriteria teknis dan mengalokasikan anggaran di dana alokasi khusus DAK tahun 2021 terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi infrastruktur pelabuhan perikanan tangkap di kabupaten kota dan provinsi seperti TPI, PPI dan PPP ,

Komisi IV?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju pak terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan publikasi (*branding*) secara intens baik melalui media elektronik, tv, maupun media cetak.

Teman-teman Komisi IV?

MENTERI PERIKANAN DAN KELAUTAN (Dr. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A):

Siap setuju pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Terakhir Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, maaf 12. Mbak Luluk silakan Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Tadi ada beberapa hal sih yang berbicara terkait lobster sebenarnya, saya hanya menggaris bawahi yang Pak Menteri sampaikan. Kalau tujuan utama dari izin ekspor itukan budidaya, sekiranya mungkin kenapa ga ada keputusan misalnya membuat *Roadmap* budidaya lobster itu dimasukkan dalam kesimpulan, iya?

KETUA RAPAT:

Saya kira sebelumnya ini sudah dibahas Bu Luluk tapi kayaknya semangatnya kita semangatnya kita sama-sama sudah paham. Iya saya rasa kita.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bukan Pak Ketua sini tapi Pak Ketua sana.

Oh Pak Menteri, ini Pak Ketua.

Pak Ketua saya izin terkait dengan yang disampaikan Bu Lulu itu nanti kita bahas aja pada saat di pengawasan. Kita kan RKA K/L sekarang ini, kan kita bahas di situ aja dulu nanti baru kemudian ini. Saya bukan ingin meluruskan Bu Luluk tapi menjembatani antara Bu Lulu dengan Pak Budi.

KETUA RAPAT:

Sebagai informasi tanggal berapa ya? Bu Lulu sebagai informasi kita, ada salah satu RDP kita mungkin dalam 2,3 minggu ini khusus untuk ini.

Terakhir 12, 12 pak tadi salah ada yang dihapus pak tadi.

12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dari (November 2019 s.d Agustus 2020), baik kunjungan kerja pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik dalam bentuk tanggapan tertulis.

Komisi IV pasti setuju.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju pak, terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ketua Hasan dengan demikian kesimpulan sudah dibacakan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sedikit Pak Ketua, boleh izin.
Sedikit 1 menit saya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Silakan Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Budi yang saya hormati,
Pak Menteri.

Bukan ingin saya memperpanjang tapi kalau kemudian di point 9 dan point 10 itu mampu dikelola dengan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut saya ini sebuah prestasi buat Pak Menteri karena 5 tahun ini kita tidak ada, nyaris tidak ada perbaikan rehabilitasi pelabuhan perikanan karena bagaimanapun infrastruktur dan ini juga prestasi untuk Komisi IV karena Ketua Komisi yang dulu juga tidak mampu untuk mengalokasikan ini. Nah sekarang Ketua Komisi sekarang mampu mengalokasikannya sekarang. Ini prestasi, makasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Bapak Ibu yang saya hormati.

Sebelum kami menutup Rapat Kerja hari ini kami persilakan yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini.

Kami persilakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Pak Ketua, Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Pertama tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang tidak pernah henti dari Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami di KKP terus memperbaiki diri; Membangun Komunikasi, Menyempurnakan Komunikasi yang selama ini sempat tertutup antara kementerian di dalam Kementerian kami antar Dirjen yang satu dengan yang lain. Sekarang *insya Allah* kami sudah mulai berangsur-angsur, semakin meyakini tujuan kami bersama-sama di Kementerian Kelautan Perikanan. Begitu juga komunikasi kami dengan Komisi IV dan ini saya pikir apa yang kami sampaikan dari awal saya diperintahkan Pak Presiden menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan itu bukan hanya sekedar cerita Pak Ketua, Pimpinan sekalian kami ingin membangun komunikasi dengan hati, dengan semangat

bahwa kami yakini, yang kami yakini bahwa Bapak Ibu Anggota Komisi IV DPR RI dan Pimpinan merupakan mempunyai konstituen yang luar biasa, yang bersentuhan langsung dengan konstituen di mana sektor kami ada di bawah pengawasan Bapak Ibu sekalian.

Secara prinsip kami berharap dukungan ini jangan pernah berhenti kepada kami dan kami siap terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam membangun sektor Kelautan dan Perikanan. Saya, Pak Sekjen dan seluruh Kepala Badan dan Dirjen dan Irjen siap untuk bahu membahu dalam rangka mensukseskan kepentingan kita bersama, kepentingan bangsa dan negara menuju terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin banyak devisa negara, yang semakin besar laut dan wilayahnya, yang semakin terurus dan terkendali. Terima kasih Pak Ketua.

*Wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV manakala ucap ada yang khilaf, saya mewakili semuanya mohon maaf lahir dan batin. Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbilalamin* Raker hari ini saya nyatakan ditutup. Semoga Bapak dan Ibu sekalian bekerja dengan sempurna dan disempurnakan oleh Allah SWT.

*Wallahul muwafiq Ila aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
196508171988031002